



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor :19**

**Tahun : 2018**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 19TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan secara tepat akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakan fungsinya, dalam bentuk pengelolaan informasi dan komunikasi secara cepat dan akurat;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membutuhkan pengembangan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang merupakan bagian dari perkembangan teknologi, budaya, informasi, dan komunikasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Telekomunikasi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetaygunaan Telematika di Indonesia;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
10. Keputusan Menteri Telekomunikasi dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga Departemen Komunikasi dan Informatika;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
2. Penggunaan Sistem Informasi adalah setiap Orang, penyelenggara Negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara e-Government.
3. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.
4. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi data dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.

5. Teknologi Informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.
7. Perangkat Keras adalah perangkat berupa mesin dan/atau peralatan.
8. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP, termasuk jaringan privat/khusus yang hanya digunakan secara internal.
9. TCP/IP (singkatan dari Transmission Control Protocol/Internet Protocol) adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet.
10. Akses adalah jalan masuk menuju tempat baik yang dapat dilihat maupun tidak dapat dilihat.
11. Data adalah suatu keadaan, bisa berupa gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep.
12. Transfer data adalah Pemindahan data dari titik satu ke titik lainnya.
13. Data Pribadi adalah perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
14. Domain adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang, atau kendali pada internet.
15. Domain Name adalah nama domain atau alamat url pada internet penyelenggara negara, orang, dan badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
16. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
17. Kode Sumber adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.
18. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
19. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
20. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. kemanfaatan;
  - b. transparansi;
  - c. sinergi;
  - d. akuntabilitas;
  - e. partisipatif dan;
  - f. kepastian hukum.
- (2) Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung maksud bahwa pembangunan TIK di Kabupaten Gunungkidul lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi infrastruktur pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, pendidikan, pariwisata, dan perhubungan.
- (3) Asas transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung maksud bahwa rencana induk pengembangan TIK bisa menjadikan keterbukaan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Gunungkidul secara akurat dan memadai.
- (4) Asas sinergi sebagaimana dimaksud ayat (1) mengandung maksud bahwa pengembangan TIK di Kabupaten Gunungkidul diharapkan bisa membangun hubungan kerjasama internal dan eksternal dengan para pemangku kepentingan, sehingga menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- (5) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) mengandung maksud bahwa Pemerintah Daerah yang terkait dapat memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pusat atas semua perencanaan dan atau kegiatan rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Gunungkidul.
- (6) Asas partisipatif sebagaimana dimaksud ayat (1) mengandung maksud bahwa adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan instansi Swasta terkait dalam penanganan serta pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Gunungkidul.
- (7) Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) mengandung maksud bahwa dalam pembangunan TIK khususnya penyelenggaraan rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara, pengguna dan yang terkait dengan rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Gunungkidul.

## Pasal 3

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai maksud untuk mengatur Teknologi Informasi dan Komunikas berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

#### Pasal 4

Tujuan adanya Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah :

- a. memudahkan dalam pelaksanaan tugas, perencanaan penyusunan Rencana Induk Pengembangan di Kabupaten Gunungkidul yang diselaraskan dengan RPJMD 2016-2021.
- b. G toC (*Government to Citizen*) dan G to B (*Government to Business*) :  
Tersedianya informasi dan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia usaha serta fasilitas untuk menampung dan mendayagunakan masukan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan kebijakan secara on-line, efektif dan akurat.
- c. G to G (*Government to Government*) :  
Terbentuknya sistem pertukaran data dan informasi antar instansi pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan terjamin keamanannya.

#### Pasal 5

- (1) Rencana induk pengembangan Teknologi informasi dan komunikasidisusun dengan sistematika sebagai berikut :  
BAB I PENDAHULUAN  
BAB II PROFIL TEKNOLOGI INFORMASI  
BAB III PERKEMBANGAN DAN TREND E-GOVERNMENT  
BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI  
BAB V ARSITEKTUR TATA KELOLA TIK  
BAB VI ROADMAP IMPLEMENTASI TIK  
BAB VII PENUTUP
- (2) Uraian secara rinci Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, sistem informasi dan komunikasi yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 14 Mei 2018

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari

Pada tanggal 14 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.  
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR     TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan era reformasi saat ini adalah terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif.

Keberadaan teknologi informasi (TI) yang dimanfaatkan secara tepat akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakan fungsinya, dalam bentuk pengelolaan informasi. Penggunaan media telematika akan meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan informasi secara internal maupun untuk kepentingan eksternal, termasuk dalam hal ini untuk masyarakat umum.

Pengembangan TI memiliki tantangan tersendiri. Terdapat keinginan pemanfaatan teknologi informasi yang besar dan menyeluruh, namun melupakan adanya perencanaan yang baik. Akibatnya banyak penerapan TI banyak yang tumpang tindih, tidak terhubung antara satu dengan yang lain dan tidak berfungsi sama sekali. Kegagalan-kegagalan tersebut menimbulkan kerugian material yang cukup besar. Hal ini diakibatkan karena tidak ada visi dan misi pengembangan TI yang diselaraskan dengan Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dimiliki.

Pemerintah pusat telah menyadari hal tersebut dan mengharapkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di daerah (e-government) menjadi lebih terarah dan terintegrasi. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 [3] tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government mengamanatkan setiap Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-government secara nasional.

Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berencana menyusun Penyelarasan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi, yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode tahun 2016-2021.

RPJMD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyebutkan terdapat beberapa isu-isu strategis yang terkait dengan teknologi informasi antara lain adalah (1) keterbatasan sumberdaya dalam penerapan teknologi informasi dan komputer (TIK) dalam rangka implementasi sistem pelayanan pemerintah berbasis digital (Digital Government Services), (2) belum adanya sistem tunggal layanan Digital Government Services (DGS) yang unggul dan terintegrasi, (3) belum optimalnya pemberitaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada media masa dan media online dan (4) masih terdapatnya wilayah *blankspot* yang belum terlayani akses informasi.

Penerapan Teknologi Informasi yang baik pada gilirannya akan mendukung proses penentuan arah dan kebijakan organisasi. Dukungan teknologi informasi bagi Pemerintah Daerah diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan organisasi dalam menjalankan berbagai fungsi organisasi. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berfungsi sebagai fasilitator, mediator serta koordinator dari fungsi-fungsi pemerintahan yang sangat erat keterkaitannya dengan aspek-aspek informasi yang sifatnya lintas wilayah dan lintas sektoral.

## 1.2. Manfaat Hasil Penyusunan

Manfaat yang bisa diperoleh dari penyusunan Rencana Induk Pengembangan ini adalah sebagai berikut:

1. memberikan arahan strategis dan kerangka kebijakan penggunaan sistem informasi/teknologi informasi bagi Pemerintah daerah untuk proses manajemen pemerintahan yang lebih sistematis, terarah, terintegrasi dan berkesinambungan, dalam kerangka mendukung tugas fungsi Pemerintahan kearah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi pemerintah (Government to Citizen, Government to Business, Government to Employee, Government to Government) yang seoptimal mungkin sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah;
2. memiliki gambaran kondisi saat ini baik dari segi sumberdaya manusia, sumber daya komputasi dan tatakelola terkait dengan sistem informasi;
3. meminimalkan resiko kegagalan proyek sistem informasi terkait dengan implementasi e-government akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah;
4. memiliki arahan strategis terhadap pengembangan sistem informasi dan e-government sehingga solusi-solusi yang bersifat parsial dan tidak sinergis dengan tujuan organisasi dapat dihindari;
5. menghindari investasi pengembangan sistem informasi yang bersifat lokal dan hanya memberikan manfaat secara lokal. Perencanaan yang memperhatikan tujuan organisasi akan memberikan manfaat yang lebih luas dalam konteks keseluruhan bisnis;
6. investasi yang perlu dikeluarkan untuk pengembangan sistem informasi bisa direncanakan dengan lebih matang sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan;

7. menghindari terciptanya sistem informasi yang terpisah-pisah dan terisolir. Sistem informasi seperti itu akan menimbulkan duplikasi kerja dan data, ketidak-tepatan data, serta sumberdaya informasi yang tidak koheren;
8. memberikan panduan bagi penentuan prioritas pengembangan sistem informasi untuk menunjang e-government. Dalam jangka panjang, hal ini akan mengurangi kesalah-pahaman yang sering terjadi antara para pengguna dan spesialis teknologi informasi; dan
9. adanya perencanaan yang matang akan membuat sistem yang dikembangkan memiliki live-time yang panjang sehingga investasi yang dikeluarkan menjadi lebih efisien.

### 1.3. Tujuan Penyusunan

Penyusunan rencana induk ini bertujuan untuk membuat suatu rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang didalamnya meliputi :

1. Profil Teknologi Informasi Kabupaten Gunungkidul
2. Perkembangan Dan Trend Teknologi Informasi
3. Kebijakan Dan Strategi
4. Arsitektur Teknologi Informasi
5. Arsitektur Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi
6. Roadmap Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi

BAB II  
PROFIL TEKNOLOGI INFORMASI

2.1. Visi dan Misi

Visi Pemerintah Gunungkidul adalah mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021.

Sedangkan Misi Gunungkidul adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
- c. memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional;
- d. meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah;
- e. mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif; dan
- f. meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Visi dan Misi Pemerintah Kab. Gunungkidul tersebut harus didukung oleh program dari Dinas Komunikasi Dan Informatika yang akan mendukung perwujudan *E-Government* di Gunungkidul. Sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Terkait Masalah Sistem Informasi/ Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

Pembangunan komunikasi, informasi dan media massa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrastruktur telekomunikasi belum dapat melayani seluruh wilayah</li> <li>- Desiminasi informasi dan pengembangan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) belum optimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya anggaran dari pemerintah untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi</li> <li>- Belum semua kecamatan memiliki KIM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peran swasta dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi (menara)</li> <li>- Adanya cell Plan menara telekomunikasi</li> <li>- Tingginya kebutuhan masyarakat akan informasi</li> </ul>
---	---	--	---

## 2.2. Kondisi SI/TI

Penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sadat informasi dan terjaminnya hak masyarakat terhadap informasi yang luas dan transparan, melalui peningkatan kesadaran terhadap kebutuhan informasi, pelayanan informasi multimedia, serta perluasan jaringan, sarana dan prasarana informasi seluruh kecamatan. Pencapaian kinerja penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika adalah operasi dan pemeliharaan website Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yakni [gunungkidulkab.go.id](http://gunungkidulkab.go.id) sebagai media untuk terjalannya komunikasi yang harmonis antar pelaku pembangunan, dan dalam mendukung globalisasi informasi di berbagai bidang.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus berupaya membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten / kota dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mencakup Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

Fasilitas telekomunikasi sangat diperlukan untuk memperlancar arus informasi dalam rangka memacu kegiatan ekonomi yang semakin menuntut pelayanan yang efisien, efektif dan cepat. Pemanfaatan sarana telekomunikasi khususnya telepon dan tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Berdasarkan data dan Kantor Cabang Pelayanan PT Telkom Gunungkidul pada tahun 2015 tercatat sentral telepon yang tersedia sebanyak 4.500 SST sementara sentral telepon yang terpasang sebanyak 3.974 SST. Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government) mengamanatkan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Melalui pengembangan e-government, pemerintah mengharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tersebut. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya untuk melakukan pembangunan infrastruktur jaringan komputer (LAN, WAN dan internet/global area network) di lingkungan pemerintah. Pembangunan jaringan komputer tersebut memungkinkan terkoneksi tiap-tiap OPD dalam jaringan internet/intranet. sehingga transformasi data/ informasi antara masing-masing unit kerja dapat berjalan semakin lancar. Diharapkan dengan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis



## BAB III

### PERKEMBANGAN DAN TREND E-GOVERNMENT

#### 3.1. E-government di Indonesia

Dalam rangka penerapan e-government untuk menuju good governance maka konsep e-government harus diterapkan di setiap lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah. Model penerapan e-government di setiap lembaga akan sangat tergantung kepada tugas, fungsi dan wewenang yang diemban oleh setiap lembaga pemerintah. Hal ini akan menentukan struktur data dan model bisnis yang mendasari model layanan dan arsitektur sistem informasi yang akan dikembangkan. Penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah harus mengacu kepada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government (INPRES No. 3 Tahun 2003).

Inisiasi penggunaan teknologi informasi di instansi-instansi pemerintahan Indonesia telah ada sebelum dimulainya penggunaan internet di Indonesia pada awal tahun 1990-an (wikibooks, Awal Internet Indonesia). Namun demikian, usaha tersebut masih merupakan upaya masing-masing instansi secara sendiri-sendiri dan belum diatur dalam suatu peraturan pemerintah. Peraturan mengenai e-government baru ada pada tahun 2003 melalui dikeluarkannya Keputusan Presiden No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengembangan E-government.

Mengingat bahwa pengembangan e-government merupakan proses yang sangat kompleks, maka Inpres No. 3 Tahun 2003 mengembangkan tanggung jawab pelaksanaan pengembangan pada beberapa kementerian yang pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Kementerian yang bertanggung jawab dibidang komunikasi dan informasi berkewajiban untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standardisasi, dan panduan yang diperlukan untuk melandasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan e-government.
2. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berkewajiban untuk memfasilitasi perencanaan dan perubahan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah pusat dan daerah.
3. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perhubungan berkewajiban untuk mendorong partisipasi dunia usaha dalam pengembangan jaringan komunikasi dan informasi di seluruh wilayah negara.

4. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi berkewajiban untuk mengkoordinasikan kemampuan teknologi yang ada di lembaga penelitian dan pengembangan dan perguruan tinggi untuk menyediakan dukungan teknologi bagi keperluan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan e-government serta pengembangan industri teknologi informasi dan telekomunikasi.
5. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional dan di bidang keuangan berkewajiban untuk menganalisis kelayakan pembiayaan rencana strategis e-government dari masing-masing instansi pemerintah, serta memfasilitasi dan mengintegrasikan rencana tersebut ke dalam rencana pengembangan e-government secara menyeluruh.
6. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan dalam negeri berkewajiban untuk memfasilitasi koordinasi antar pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Sehubungan dengan pembuatan dokumen rencana pengembangan e-government di lembaga-lembaga pelaksana e-government, Departemen Komunikasi dan Informasi selaku pengembang tanggung jawab tersebut mengeluarkan "Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-government Lembaga Versi 1.0". Dalam panduan tersebut, ditekankan bahwa setiap lembaga pelaksana e-government perlu memiliki cetak biru (Rencana induk) pengembangan e-government.

Yang dimaksud dengan cetak biru pengembangan e-government menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003 adalah rincian rencana pengembangan e-government yang di antaranya memuat:

1. Cetak biru aplikasi.
2. Cetak biru sumberdaya manusia.
3. Cetak biru jaringan.
4. Cetak biru informasi.
5. Cetak biru pendanaan.
6. Cetak biru struktur organisasi, sistem manajemen dan proses kerja.
7. Cetak biru perawatan (maintenance).

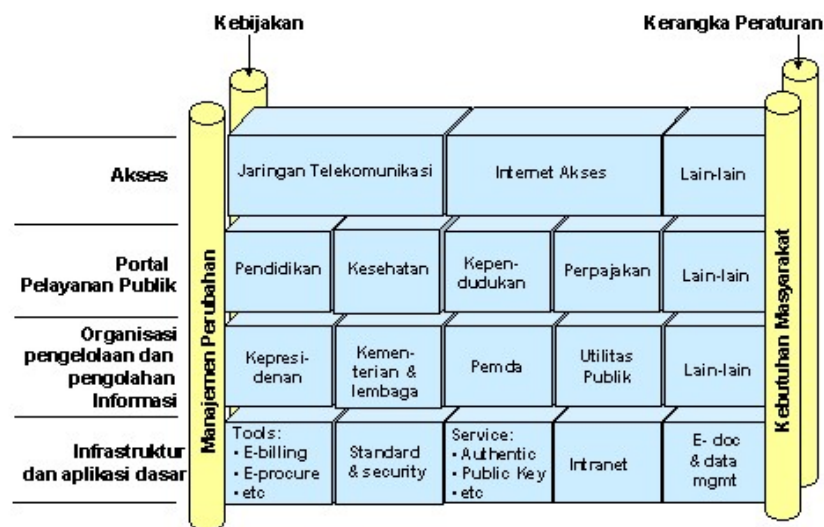
Pelaksanaan pembuatan cetak biru tersebut diserahkan pada masing-masing lembaga pelaksana e-government.

### 3.2. Kerangka Arsitektur E-government

Berdasarkan Panduan pembangunan infrastruktur portal pemerintah Versi 1.0 (Inpres Nomor 3 Tahun 2003), Kerangka arsitektur e-government terdiri dari empat lapis struktur yang ditunjang oleh empat pilar, yakni:

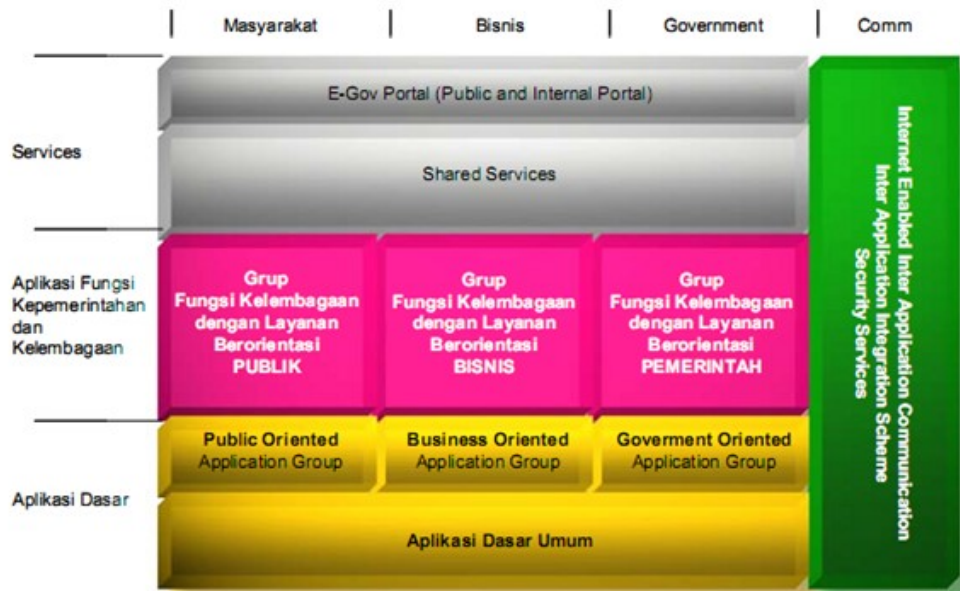
1. Penataan sistem manajemen dan proses kerja (manajemen perubahan).
2. Pemahaman tentang kebutuhan publik (kebutuhan masyarakat).
3. Penguatan kerangka kebijakan.
4. Pemaparan peraturan dan perundang-undangan (kerangka peraturan).

Kerangka arsitektur e-government secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut:



### 3.3. E-government Solution Map

Dalam peta solusi aplikasi e-government (e-government Solution Map), sistem aplikasi dikelompokkan melalui pendekatan matrik antara orientasi fungsi layanan dan sifat fungsi sistem aplikasi tersebut. Melalui pendekatan ini, sistem aplikasi dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok seperti terlihat pada gambar berikut:



Adapun kelompok tersebut adalah :

1. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya langsung memberikan pelayanan kepada pengguna (aplikasi front office).
2. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya lebih banyak ditujukan untuk memberikan bantuan pekerjaan yang bersifat administrasi pemerintahan, serta fungsi-fungsi kedinasan dan kelembagaan (aplikasi back office).
3. Kelompok sistem aplikasi yang fungsi layanannya bersifat mendasar dan umum, diperlukan oleh setiap pengguna, atau setiap sistem aplikasi lain yang lebih spesifik. Sifat layanan aplikasi dasar biasanya back office.

Untuk setiap kelompok sistem tersebut, masing-masing dibagi lagi kedalam tiga sub-grup berdasarkan orientasi pengguna yang dilayaninya, sebagai berikut:

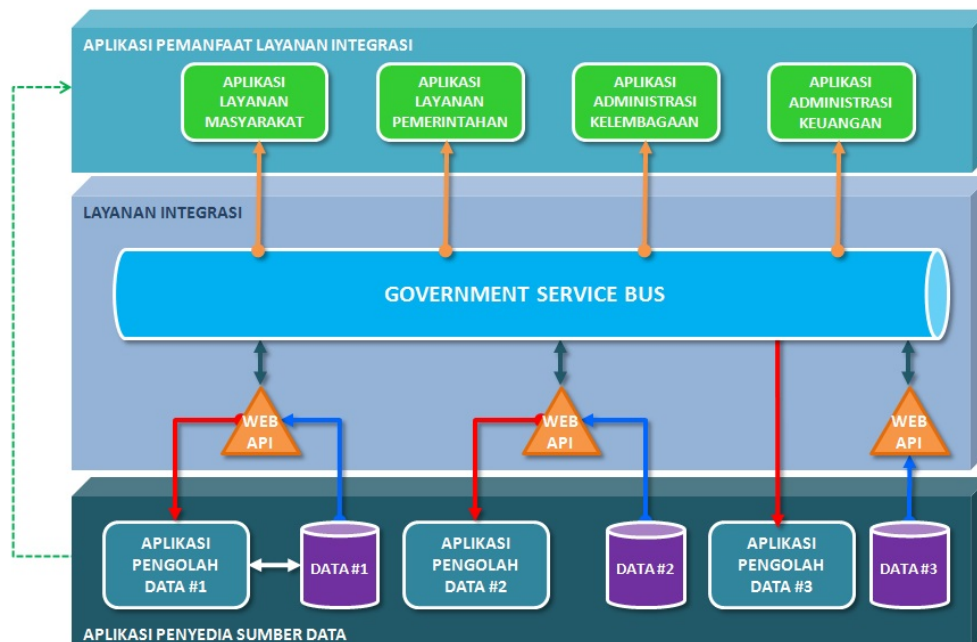
1. Kelompok sistem aplikasi e-government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat (G2C: Government To Citizen).
2. Kelompok sistem aplikasi e-government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis (G-TO-B: Government To Business).

3. Kelompok sistem aplikasi e-government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga pemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (G-TO-G: Government To Government). Terakhir adalah kelompok fungsi umum yang memberikan layanan integrasi dan komunikasi antar sistem aplikasi, juga masalah keamanan, dan lain-lain.

#### 3.4. Perkembangan E-government di Indonesia Saat Ini.

Perkembangan E-government di Indonesia saat ini telah masuk pada tahap Integration Era. Data yang berasal dari berbagai macam sistem informasi diintegrasikan untuk menampilkan data secara global dan satu tempat. Pendekatan SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) dan IAAS (Infrastructure as a service) diimplementasikan untuk mewujudkannya. Platform integrasi sistem informasi telah dibangun dengan harapan mampu memberikan panduan dalam pengembangan Sistem Informasi e-government.

Teknologi Web-Services adalah pilihan ideal dalam penerapan Interoperabilitas Sistem Informasi yang mencakup keragaman informasi dan data. Web-Services beroperasi pada teknologi berbasis Standar Terbuka (Open Standard) dan dalam pengembangannya dapat menggunakan Perangkat Lunak dengan Kode Sumber Terbuka (Open Source Software). Web-Services diwujudkan dalam bentuk Aplikasi Perantara berbasis Web yang berfungsi sebagai layanan pengolah data dan bersifat reusable (dapat didaur ulang).



Interoperabilitas antara sistem informasi yang dibangun menghasilkan sebuah sajian data yang holistik (menyeluruh). Pimpinan daerah dengan mudah meminta data yang daring secara realtime saat dibutuhkan. Proses pengambilan keputusan lebih cepat dilakukan sehingga kebijakan akan segera cepat diimplementasikan. Umpan balik yang berasal dari kebijakan tersebut akan termonitor.

Konsep pengelolaan dan penyajian data secara realtime untuk mendukung pengambilan keputusan inilah yang menjadi karakteristik dari konsep SMART CITY. Konsep smart city adalah sebuah konsep pengelolaan kawasan yang melibatkan solusi teknologi tepat guna seperti sensor dan kamera (Internet of Thing) dan infrastruktur informasi & telekomunikasi (ICT) untuk mengelola aset kawasan. Tujuan dari pengembangan Smart City ini adalah meningkatkan kualitas hidup warga dengan menggunakan teknologi informatika untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memenuhi kebutuhan warga.

Konsep ini sesuai diterapkan pada kawasan urban/perkotaan karena memiliki ekosistem yang lebih siap dengan perkembangan teknologi. Kota memiliki tingkat penetrasi teknologi yang tinggi. Pemerintah kabupaten memiliki masalah tersendiri terkait dengan tingkat penetrasi teknologi yang rendah. Untuk itu diperlukan pendekatan baru yang sesuai dengan kondisi pemerintah kabupaten yang kondisinya berbeda dengan kota. Karakteristik yang dimiliki oleh sebagian besar kabupaten di Indonesia adalah kepemilikan sumberdaya alam. Lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan obyek wisata alam tidak dimiliki oleh kota. Cakupan jalur telekomunikasi juga tidak merata dan ini menghalangi distribusi informasi dari satu tempat ke tempat yang lain.

Konsep Smart Village adalah sebuah konsep pendekatan pengembangan kawasan pedesaan dengan pendekatan teknologi informatika yang sederhana. Konsep ini meliputi pengumpulan data dan informasi dari berbagai aset data yang dimiliki oleh sebuah pemerintah daerah untuk kemudian disajikan secara realtime untuk menunjang pengambilan keputusan oleh pihak pimpinan kabupaten. Konsep ini merupakan bentuk sederhana dari sebuah konsep Smart City. Perbedaannya adalah sumber informasi yang disajikan yaitu data yang khas dimiliki oleh pedesaan seperti data penduduk desa, program desa, potensi desa, pembangunan desa dan lain-lain. Permasalahan yang dihadapi juga berbeda, yaitu peningkatan derajat literasi, pengentasan kemiskinan, data pertanian dan lain-lain.

## BAB IV

### KEBIJAKAN DAN STRATEGI

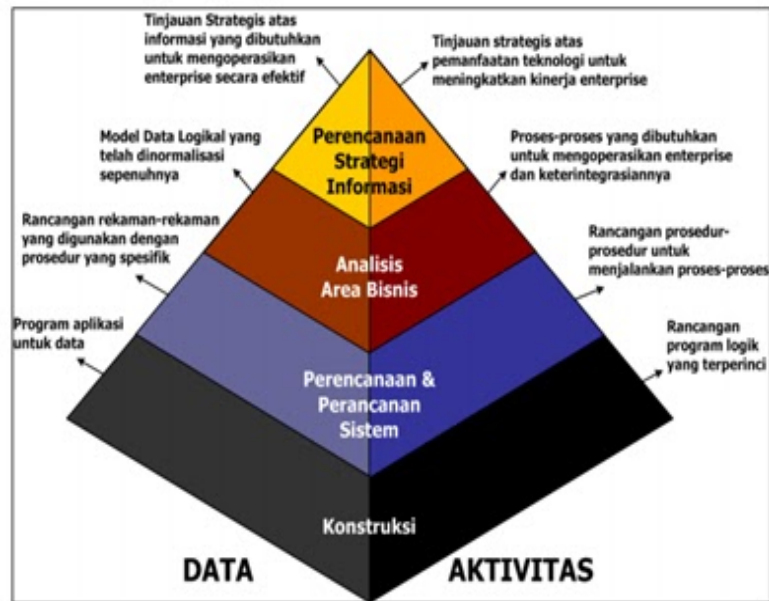
#### 4.1. Perencanaan Strategis Sistem Informasi dan Teknologi Informasi

Perencanaan Strategi Informasi merupakan proses untuk memformulasikan strategi informasi bagi suatu perusahaan yang meliputi perumusan kegunaan dari sistem informasi dan pengelolaannya. Keseluruhan proses perencanaan ini akan mendefinisikan dengan jelas apa yang harus dicapai sistem dan batasan-batasan yang dimiliki oleh sistem yang dihasilkan. Penekanan utama dari perencanaan strategi informasi adalah bagaimana menggunakan teknologi secara tepat untuk membantu perusahaan agar dapat meningkatkan keuntungan, mendorong pertumbuhan perusahaan dan memenangkan persaingan dengan para pesaingnya tanpa melupakan etika bisnis.

Perencanaan strategis informasi merupakan bagian dari metodologi kerekayasaan informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi strategi pencapaian visi dan misi sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI) melalui pengelolaan dan pengembangan SI/TI [15]. Visi dan misi organisasi umumnya dinyatakan dalam bentuk sasaran dan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi tersebut dan kemudian ditentukan strategi yang diperlukan serta tolok ukur bagi pelaksanaan dan pengukuran hasil-hasilnya. Peran SI/TI, sebagai pendukung terwujudnya tujuan organisasi, dapat diterjemahkan sebagai misi sistem informasi dalam organisasi. Hubungan antara strategi organisasi dengan SI/TI dinyatakan sebagai berikut:

1. Misi SI/TI mengarahkan pembangunan dan implementasi arsitektur organisasi melalui sekumpulan tujuan. Tujuan adalah pernyataan bagian dari misi sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi.
2. Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan dan implementasi aplikasi diterjemahkan kedalam tolok ukur pencapaian tujuan atau yang dikenal sebagai indikator tujuan kunci (key goal indicator). Indikator ini sering disebut sebagai indikator tunda (lag indicator) karena nilai indikatornya baru akan diketahui setelah aktivitas pencapaian tujuan tersebut selesai dilaksanakan.
3. Untuk meningkatkan kemungkinan kesuksesan implementasi aplikasi, agar sesuai dengan arah misi SI/TI, diperlukan faktor kritis sukses (Critical Success Factor).

4. Tingkat pemenuhan Critical Success Factor selama proses implementasi diukur dengan indikator kinerja kunci (Key Performance Indicator). Dalam metodologi rekayasa informasi, tiap langkah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi data dan sisi aktivitas. Perencanaan strategis informasi di sisi data, arah tujuan strategisnya adalah upaya terhadap pemenuhan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Sedangkan pada sisi aktivitas, arah tujuan strategisnya adalah dalam hal pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kinerja organisasi.



#### 4.2. Sumber Daya Manusia di bidang Teknologi Informasi

Sumber daya manusia di bidang teknologi informasi memiliki tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan implementasi, penggunaan, pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi teknologi informasi dalam instansi. Dalam pengembangan SDM e-government ini ditentukan tujuan, strategi, waktu dan indikator keberhasilan inisiatif tersebut. Selain itu perlu ditekankan juga objek layanannya, apakah termasuk dukungan layanan Government to Government (G-TO-G), Government to Business (G-TO-B) atau Government to Citizen (G2C) sehingga dari seluruh pengembangan yang dilakukan dalam 5 tahun ke depan terjadi proposional layanan, baik untuk pemerintahan secara internal atau pemerintah pusat, kalangan bisnis maupun untuk masyarakat. Strategi pengembangan sumberdaya manusia dibidang Teknologi Informasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Sumberdaya Manusia dibidang Teknologi Informasi

Tujuan	:	Peningkatan kualitas SDM dibidang Teknologi Informasi
Strategi	:	Meningkatkan kualitas SDM dibidang Teknologi Informasi
Komponen	:	SDM
Layanan	:	Government to Government (G to G)
Waktu	:	2017-2021
Target	:	Setiap OPD memiliki minimal 2 (dua) orang tenaga teknis untuk pengelola jaringan dan sistem aplikasi, serta memiliki kemandirian dalam hal tata kelola sumberdaya TIK

Tabel Strategi Pengembangan SDM dibidang TI

No	Kegiatan	Indikator Hasil	Sumber daya	Penanggung Jawab
1	Pembentukan Tim	Terbentuk Tim Tingkat Kabupaten dan OPD sesuai tugas/fungsi dan tanggung-jawabnya	Dana, Tim OPD	Sekda, Dinas Kominfo
2	Penempatan SDM sesuai fungsi organisasipengelola TIK	Terkelolanya sumber daya TIK dengan baik dan mandiri	Data Kepegawaian	BKD
3	Pelatihan	Meningkatnya kompetensi SDM dalam bidang TIK dan Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah	Dana dan kemitraan	Sekda, BKAD& Dinas Kominfo

Rencana pengembangan SDM ini dilakukan setiap tahun untuk mempersiapkan SDM yang handal dimasing-masing unit kerja yang akan bertanggung-jawab terhadap sistem yang dibangun.

#### 4.3. Portofolio aplikasi

Portofolio aplikasi sebagai hasil dari perencanaan strategi SI. Aplikasi strategis adalah aplikasi yang kritis terhadap strategi organisasi di masa datang. Aplikasi operasional utama adalah aplikasi yang digunakan saat ini oleh organisasi dan menentukan keberhasilan bisnisnya.

Aplikasi berikutnya adalah aplikasi potensi tinggi, yaitu aplikasi inovatif yang mungkin bisa menciptakan peluang untuk meraih keuntungan di masa datang, tetapi masih belum terbukti. Sedangkan aplikasi pendukung adalah aplikasi yang bermanfaat tetapi tidak kritis terhadap keberhasilan organisasi.

Matriks tersebut menyatakan bahwa aplikasi pada keempat segmen tersebut memerlukan strategi yang sangat berbeda dalam hal perencanaan, pengembangan, implementasi, dan operasinya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan peran masing-masing aplikasi dalam bisnis. Berikut ini adalah hasil pemetaan aplikasi kedalam kuadran portofolio aplikasi pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

High potensial	Strategic
Sistem Pendukung Keputusan/Dashboard Smartvillage* Cakrawala Budaya Dhaksinarga** Portal Pariwisata**	e-Gov Portal** Sistem Informasi Desa** SIM Penilaian Kinerja PNS** SIMASET* SIM Manajemen Data Pembangunan* Gunungkidul Plan* SIM Tata Ruang* SIMNAKER*
Support	Key Operational
SIM pengaduan masyarakat** SIM Arsip** SIM Surat Masuk dan keluar ** SI Pajak & Retribusi* SI Tambahan penghasilan** E-Sakip**	SIMPEG** E-Monev** SIPKD** SI Kependudukan** SIM Katalog Barang Daerah* SIMPOTENDA* SIM Peternakan, Perkebunan, Pertanian* SIMKES** SIM Perijinan* LPSE**

Keterangan:

\*\* Sistem yang telah ada dan perlu dikembangkan

\* Sistem yang direncanakan

#### 4.4. Infrastruktur Jaringan

Pembuatan infrastruktur jaringan komputer di Kabupaten Gunungkidul menggunakan konsep DMZ (De Militarized Zone) dimana semua server utama diletakkan pada daerah bebas gangguan keamanan yang diapit oleh dua firewall. Firewall pertama merupakan exterior firewall yang menggunakan perangkat bridge firewall (diletakkan pada NOC). Pada gateway diberikan fasilitas VPN (Virtual Private Network) untuk menjaga kerahasiaan pengiriman data baik voice atau non voice dari dan keluar jaringan Kabupaten Gunungkidul sedangkan dari sisi komputer client diberi software VPN Client.

Firewall kedua diletakkan pada sisi intranet yang dilengkapi juga dengan VPN server yang dipasang pada router. Fungsi VPN adalah untuk menjamin kerahasiaan pengiriman data karena antara NOC (Network Operation Center) dan client dihubungkan dengan menggunakan wireless yang keamanannya rendah.

Server farm berisi server-server seperti bridge, primary web server, secondary web server, DNS server, mail server, proxy server, application server dan DHCP Server. Server-server di NOC telah optimal karena menggunakan pilihan sistem operasi Linux/Unix dan Mikrotik. Spesifikasi wireless LAN yang dapat digunakan antara sisi NOC dan client adalah sebagai berikut:

1. WLAN dengan frekuensi 5.3 GHz s.d 5.8 GHz penggunaan frekuensi ini bertujuan agar interefrensi antar pengguna perangkat wireless tidak banyak terjadi karena frekuensi 2.4 GHz sudah terlalu rapat dan gangguan yang terjadi sangat besar. Selain itu frekuensi 5GHz sebelum dipasang harus mendapat ijin dari Departemen yang terkait.
2. Menggunakan metode enkripsi WPA atau WEP pada perangkat radio yang tersedia baik antara NOC dan client maupun antar client sendiri. Fungsi WPA/WEP untuk menjamin tingkat keamanan transmisi data selain adanya VPN antara NOC dan client.
3. Untuk pengembangan infrastruktur jaringan ke depan bisa diarahkan pada penggunaan fiber optic dikarenakan mudah dalam maintenance dan tidak menimbulkan masalah kepadatan frekuensi.

Teknologi Fiber optik yang dimiliki oleh telah digunakan untuk menghubungkan dinas kesehatan dengan NOC dan Bappeda dengan NOC. Penggunaan teknologi fiber optik relatif stabil dan tidak mudah mengalami gangguan.

#### 4.5. Tahap Inisiatif Aplikasi

Pada tahap pengembangan infrastruktur aplikasi dimulai dengan evaluasi aplikasi di tiap instansi sehingga diketahui kondisi implementasi sistem aplikasi. Pendalaman permasalahan perlu dilakukan guna mendapatkan solusi yang tepat. Dalam 5 tahun diharapkan telah terbentuk sebuah *data-center* yang merupakan muara dari semua data kemudian terdapat arsitektur interoperabilitas sistem informasi yang mampu melayani kebutuhan data yang berasal dari OPD terkait. Sistem ini menggunakan konsep *Software as a Service* (SaaS) dengan mengimplementasi *Web Service*.

Pada tahap pengembangan infrastuktur data dan informasi diharapkan dalam waktu 2 tahun pertama terdapat kajian teknis interoperabilitas sistem, hasil evaluasi implementasi sistem informasi, Audit TIK dan pendataan sumberdaya TI. Tahun ke-2 dimulai pembuatan aplikasi *dashboard* eksekutif yang bersifat interaktif yang berfungsi sebagai Sistem Pendukung Keputusan. Tahun ke-3 sampai tahun ke-5 diharapkan telah tercapai implementasi interoperabilitas data dan informasi.

Penataan domain, pemutakhiran isi situs *web* dan *maintenance* terus dilakukan secara berkala dan dimonitor dengan oleh Dinas Kominfo. Penggunaan media sosial untuk meningkatkan kunjungan ke situs *web* Kominfo terutama portal pariwisata dilakukan secara terus menerus.

#### 4.6. Tahap Inisiatif Infrastruktur

Pada periode sebelumnya, telah terbangun sebuah unit NOC yang memiliki tugas pengelolaan jaringan yang berorientasi pada ketersediaan layanan tingkat tinggi. Tahap pengembangan infrastruktur jaringan komputer selanjutnya diharapkan dalam 5 tahun ke depan telah terdapat standar layanan minimal terkait ketersediaan jaringan, standar keamanan jaringan, standar prosedur operasi dan daftar aset dan sumberdaya di NOC. Peningkatan jumlah komputer yang terhubung ke jaringan harus diimbangi dengan peningkatan *bandwidth*. Untuk memperluas jaringan khususnya fasilitas akses Internet masyarakat, tiap tahunnya dilakukan penambahan terminal akses bagi masyarakat.

*Bandwidth* yang setiap tahun meningkat membutuhkan investasi infrastruktur yang stabil, berkapasitas besar dan rendah dalam biaya perawatan. Solusi infrastruktur *Fiber Optic* (FO) adalah pilihan yang tepat. 5 (lima) tahun kedepan diharapkan sudah tersedia layanan menggunakan infrastruktur FO untuk menghubungkan kantor dinas yang berlokasi di Kota.

Pengembangan layanan membutuhkan sumberdaya yang besar. Infrastruktur Jaringan NOC dan *Datacenter* membutuhkan *upgrade* dalam hal sumberdaya komputasi seperti *Processor*, *Memory* dan *Storage*. Selain itu perangkat pendukung lain perlu diukur dan dilakukan *upgrade* seperti rak penyimpanan *server*, genset, AC dan perangkat keamanan.

Pengelolaan pengelolaan NOC harus tertata, profesional dan akuntabel. Untuk itu diperlukan dokumentasi kegiatan, pendataan sumberdaya TIK, kajian permasalahan jaringan dan audit. Pimpinan/CIO secara aktif harus melakukan cek dan ricek terkait dengan aktivitas operasional NOC. Pihak NOC juga diharapkan melakukan komunikasi yang aktif terhadap CIO sehingga terjalin hubungan yang baik antar pihak-pihak terkait. Peningkatan pengetahuan pengelolaan jaringan NOC diperlukan untuk pengelola NOC dan pimpinan/CIO agar terjalin komunikasi yang efektif dan mengurangi timbulnya kesalahpahaman karena *knowledge gap* antara kedua pihak. Untuk menjaga kepercayaan pengelolaan NOC kepada pihak luar dinas Kominfo Audit dilakukan secara internal terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan audit eksternal. Hasil audit kemudian dipublikasikan.

#### 4.7. Tahap Inisiatif Organisasi & Tata Kelola

Pada tahap pengembangan kebijakan diharapkan terciptanya beberapa kebijakan dalam hal jabatan fungsional pranata komputer, penerapan *Single Identity Number* (SIN), sistem monitoring (audit), rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi, serta kebijakan dalam penyusunan masterplan jangka panjang. Penerapan SIN tersebut akan diakomodasi dalam kerangka pengembangan Sistem Informasi Desa (SID).

Kebijakan pengelolaan TI dengan melibatkan pihak ke-3 perlu ada pengawasan dan evaluasi yang baik. Perlu pengkajian dalam hal ketergantungan pihak ke-tiga dan keamanan data.

Arah kebijakan yang menggunakan konsep baru yaitu *smart village* memiliki konsekuensi dukungan TIK yang besar. Tidak banyak rujukan implementasi terkait dengan *smart village*. Kajian teknis dan kelayakan dibutuhkan sebelum adanya implementasi. Dibutuhkan adanya komitmen dan pemahaman yang benar mengenai konsep tersebut. Setelah komitmen perlu adanya *upgrade knowledge* mengenai perkembangan e-government saat ini dengan cara pelatihan dan mengikuti seminar dan workshop mengenai *smart city initiatives*. Selain mempelajari mengenai *success story e-government*, diperlukan juga adanya *failure story* sehingga memiliki gambaran yang jelas terhadap sebuah kasus implementasi.

Pentingnya pengawasan terhadap implementasi TI akan menghasilkan program yang berhasil dan mampu memberikan saran pengembangan secara berlanjut. Audit TI akan menghilangkan masalah kepercayaan yang muncul karena pengelolaan TI. Audit diperlukan karena banyak pihak tidak memahami hal-hal teknis terkait dengan Pengelolaan TI. Meskipun dokumentasi dan pelaporan berkala telah dilakukan, namun karena tidak memahami konten laporan timbulah kecurigaan. Audit TI akan memberikan penilaian yang obyektif dan pada gilirannya akan menghilangkan kecurigaan dan memunculkan kepercayaan.

Pada tahap pengembangan sumber daya manusia difokuskan pada pembentukan tim teknis TIK yang akan melakukan transfer keahlian kepada sumber daya manusia di masing-masing instansi (para Pranata Komputer) dan melakukan pengelolaan terhadap sumber daya TIK. Pelatihan-pelatihan yang diberikan adalah tentang pengelolaan website instansi, pengelolaan jaringan komputer, pengelolaan database serta pelatihan perawatan teknologi informasi.

Selain peningkatan kemampuan dalam bidang TIK, sumber daya manusia di tiap instansi juga diberikan wawasan tentang sistem keamanan komputer, penerapan SIN (*Single Identity Number*) dan aturan jabatan fungsional pranata komputer. Dalam 1 tahun ke depan diharapkan tiap instansi telah memiliki sumber daya manusia yang mampu dalam mengelola sumber daya TIK di masing-masing instansinya.

Pada tataran pengelolaan *datacenter* dan NOC diperlukan penanggungjawab (manajemen tingkat menengah) yang memiliki pengetahuan teknis dan wawasan dalam birokrasi pemerintahan. Pengembangan sumber daya berupa *update* pengetahuan di bidang pengelolaan NOC dan *datacenter* perlu terus dilakukan dengan cara pelatihan dan studi banding di beberapa instansi yang telah memiliki sistem pengelolaan NOC dan *datacenter* yang baik.

Keterlibatan masyarakat sangat erat kaitannya dengan keberhasilan implementasi sistem informasi dan teknologi informasi yang ada di lingkungan Pemkab. Saat ini masyarakat memiliki akses informasi adalah

melalui operator seluler. Dengan kondisi telekomunikasi yang sekarang berkembang, Gunungkidul termasuk yang cukup baik dalam cakupan layanan ini. Namun bila dibandingkan dengan daerah lain di provinsi DIY, maka kondisi Gunungkidul termasuk tertinggal. Untuk itu diperlukan aturan yang mendukung penyebaran jangkauan sinyal dari operator seluler sehingga mampu menjangkau sebagian besar wilayah Gunungkidul terutama yang memiliki potensi daerah yang bisa dikembangkan seperti industri rumah tangga dan pariwisata.

Terakhir yang paling penting dalam pengembangan TIK di sebuah institusi adalah dukungan dari pimpinan. Saat ini dukungan pimpinan sudah baik untuk memajukan instansi, namun perlu untuk meningkatkan tingkat pemahaman TIK sehingga mampu memberikan petunjuk-petunjuk, ide-ide, terobosan dan mengambil keputusan yang tepat dalam membuat aturan terkait dengan implementasi TIK. Untuk itu diperlukan paparan, kajian, seminar, semiloka dan studi banding yang bertema keberhasilan pemanfaatan TIK dimana wajib diikuti oleh jajaran pimpinan agar tercipta satu gambaran yang tepat sehingga termotivasi untuk menerapkan TIK dalam institusi yang dipimpinnya.

**BAB V**  
**ARSITEKTUR TATA KELOLA TIK**

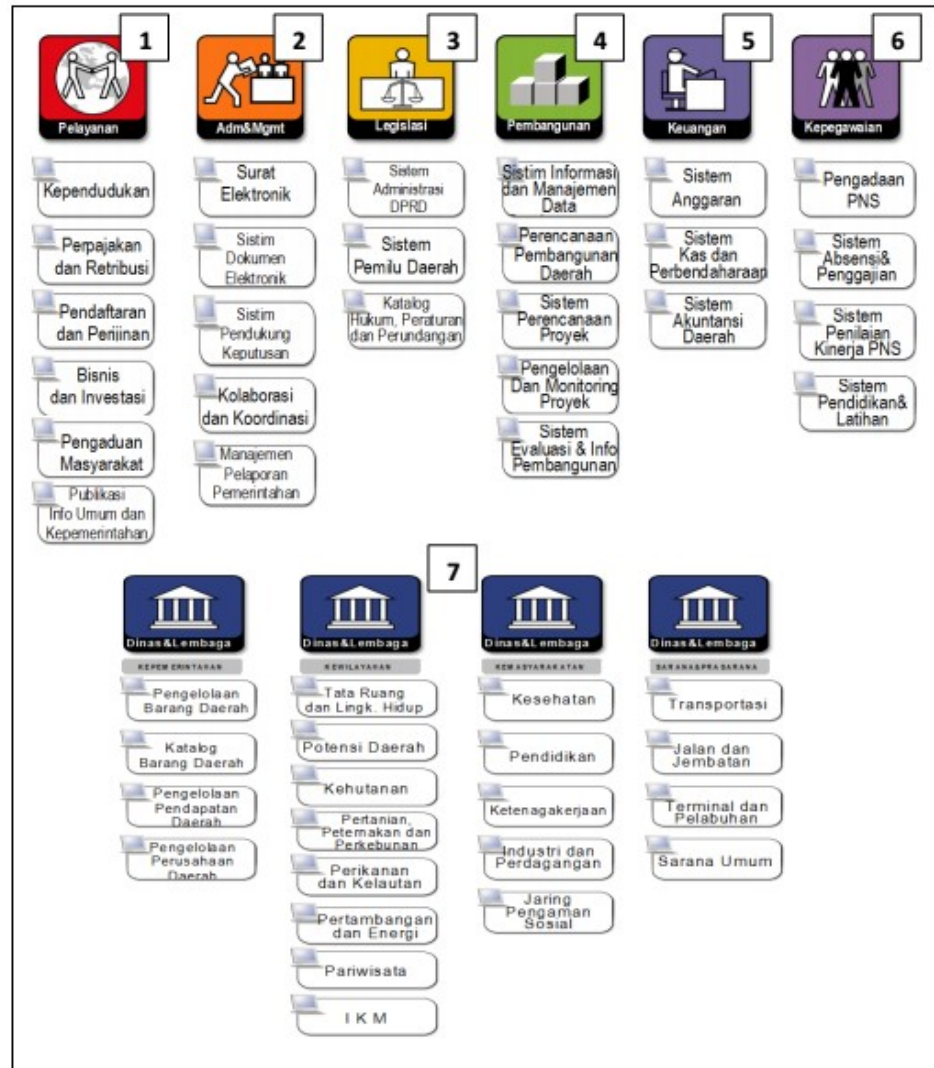
5.1. Pelaksanaan Strategi SI/TI

Strategi SI/TI dalam pengembangan sistem aplikasi e-government disusun berdasarkan pendekatan fungsional layanan dari sistem pemerintahan yang harus diberikan oleh suatu Pemerintah kepada masyarakatnya, dan urusan administrasi serta fungsi lain yang berhubungan dengan kelembagaan Pemerintahan Pusat, yang diperlukan guna terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik dan efisien.

Fungsi-fungsi kelembagaan, fungsi pemerintahan, dan layanan kemudian dikelompokkan dalam grup-grup blok Fungsi. Setiap grup Blok Fungsi terdiri dari satu atau lebih Modul Fungsi yang mencerminkan kelompok dari unit fungsi yang lebih kecil. Dengan demikian Modul adalah komponen dan merupakan bagian dari Blok Fungsi. Dengan pendekatan ini pada dasarnya ada 3 utama fungsi dasar, yaitu:

1. Fungsi dasar dukungan dan layanan kelembagaan, di mana fungsi dasar ini berperan pada peningkatan hubungan kerja yang efisien dan efektif di dalam setiap lembaga pemerintah (intra-governmental) itu sendiri, juga hubungan antar lembaga pemerintah (inter-governmental).
2. Fungsi dasar pemerintahan, adalah fungsi pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan menunjang proses pembangunan nasional. Fungsi dasar itu adalah fungsi politik dan legislasi, fungsi pertahanan dan keamanan, fungsi hukum dan perundang-undangan (yuridis), fungsi moneter dan fiskal, dan fungsi pembangunan nasional.
3. Fungsi dasar publikasi informasi dan layanan pemerintah, yaitu fungsifungsi yang berisi layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, dunia usaha, dan juga kepada lembaga pemerintah lainnya. Fungsi layanan ini bisa berupa publikasi informasi, pendaftaran dan perizinan, dan lain-lain. Penjabaran dari strategi-strategi diatas dilakukan untuk memudahkan identifikasi dan klasifikasi fungsi pemerintahan di dalam dokumen ini, taksonomi untuk setiap Blok Fungsi, Sub-Blok Fungsi dan Modul. Kelompok Blok Fungsi dan bagian-bagiannya (komponen Modul) disusun dalam sebuah Bagan Fungsi yang selanjutnya dalam dokumen perancangan sistem aplikasi ini disebut sebagai Kerangka Fungsional Sistem Pemerintahan yang berjumlah tujuh buah yaitu :
  1. Fungsi Pelayanan.
  2. Fungsi Administrasi dan Manajemen.
  3. Fungsi Legislasi.
  4. Fungsi Pembangunan.
  5. Fungsi Keuangan.
  6. Fungsi Kepegawaian.

## 7. Fungsi Dinas dan Lembaga.



## 5.2. Blok Fungsi

Untuk memudahkan identifikasi dan klasifikasi fungsi pemerintahan, di dalam perencanaan ini, dibuatkan taksonomi untuk setiap Blok Fungsi, Sub-blok Fungsi dan Modul, sebagai berikut:

Blok Fungsi	PELAYANAN
Sub-Blok Fungsi	-
Modul	Kependudukan Perpajakan dan Retribusi Bisnis dan Investasi Pengaduan Masyarakat Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan
Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT (ADM & MGM)
Sub-Blok Fungsi	-
Modul	Surat Elektronik Sistem Dokumen Elektronik Sistem Pendukung Keputusan
Blok Fungsi	LEGISLASI
Sub-Blok Fungsi	-
Modul	Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan
Blok Fungsi	PEMBANGUNAN
Sub-Blok Fungsi	-
Modul	Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan dan Monitoring Proyek Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan
Blok Fungsi	KEUANGAN
Sub-Blok Fungsi	-
Modul	Sistem Anggaran Sistem Akuntansi Daerah
Blok Fungsi	KEPEGAWAIAN
Sub-Blok Fungsi	-
Modul	Sistem Absensi dan Penggajian Sistem Penilaian Kinerja PNS
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEPEMERINTAHAN
Modul	Pengelolaan Barang Daerah Katalog Barang Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Perusahaan Daerah
Sub-Blok Fungsi	KEWILAYAHAN
Modul	Tata-ruang dan Lingkungan Hidup Potensi Daerah Pembangunan Desa (sistem informasi desa) Kehutanan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Perikanan dan Kelautan Pertambangan dan Energi Pariwisata
Sub-Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN
Modul	Kesehatan Pendidikan Ketenagakerjaan Industri dan Perdagangan Jaring Pengaman Sosial
Sub-Blok Fungsi	SARANA DAN PRASARANA
Modul	Transportasi Jalan dan Jembatan Terminal dan Pelabuhan Sarana Umum

## 5.2.1. Blok Fungsi Pelayanan

### 1. Modul Sistem Kependudukan

Modul	KEPENDUDUKAN		
Blok Fungsi	PELAYANAN		
Sub Blok Fungsi			
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input checked="" type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input type="checkbox"/> Basis Data
		<input type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input checked="" type="checkbox"/> Generik	<input type="checkbox"/> Spesifik
Object Layanan	<input type="checkbox"/> G-TO-G	<input type="checkbox"/> G-TO-B	<input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<p>Pelayanan pendaftaran penduduk.                      Pelayanan dan pengelolaan data mutasi penduduk.                      Pembuatan dan pengelolaan data KK dan KTP.                      Pembuatan dan pengelolaan data Akta Pencatatan Penduduk (akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak).                      Pembuatan Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Tamu.                      Pelaporan data kependudukan.                      Pelaporan data penduduk miskin                      Pengurusan akta kelahiran Online</p>		
Narasi	<p>Modul Kependudukan adalah aplikasi pelayanan, pengelolaan dan pengolahan data kependudukan. Aplikasi dilengkapi dengan fitur pelaporan kependudukan (untuk disampaikan kepada Mendagri). Sebagian data kependudukan di publish ke internet untuk keperluan masyarakat. Selain itu disediakan pula fitur pembuatan akta kelahiran online.</p>		
Organisasi	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
Integrasi	<p>Sistem Informasi Desa                      Sistem Kependudukan di tingkat Kabupaten/Kabupaten lain                      Sistem Kependudukan di tingkat Propinsi lain                      Sistem Kependudukan di tingkat Nasional</p>		
Info Tambahan	<p>Rekomendasi: Membangun jaringan sistem kependudukan di setiap kecamatan yang terhubung ke Pemda, web-based, clientserver, automatic data synchronization, distributed processing.</p>		

### 2. Modul Perpajakan dan Restribusi

Modul	E-Ticketing - PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI		
Blok Fungsi	PELAYANAN		
Sub Blok Fungsi			
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input checked="" type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input type="checkbox"/> Basis Data
		<input type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input checked="" type="checkbox"/> Generik	<input type="checkbox"/> Spesifik
Object Layanan	<input type="checkbox"/> G-TO-G	<input checked="" type="checkbox"/> G-TO-B	<input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<p>Memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat yang meliputi pajak Kabupaten Gunungkidul. Jenis pajak Kabupaten terdiri dari:                      Pajak Hotel                      Pajak Restoran                      Pajak Hiburan                      Pajak Reklame                      Pajak Penerangan Jalan                      Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C                      Pajak Parkir                      Memberikan pelayanan retribusi kepada masyarakat yang meliputi:                      Retribusi jasa umum                      Retribusi jasa usaha                      Retribusi perijinan tertentu</p>		
Narasi	<p>Pajak Kabupaten Gunungkidul merupakan suatu sistem perpajakan yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga tidak tumpang tindih antara pajak pusat dan Pajak Daerah.</p>		
Narasi	<p>Daerah Kabupaten diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan Retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.</p>		
Organisasi	BKAD dan Dinas/lembaga daerah terkait		
Integrasi	<p>Blok Fungsi Administrasi dan Management, Modul Sistem Dokumen Elektronik.                      Blok Fungsi Pelayanan, Modul Pendaftaran dan Perijinan.                      E-Samsat</p>		
Info Tambahan	<p>Rekomendasi: Sistem perpajakan daerah dilakukan secara terpadu dan sejalan dengan sistem perpajakan nasional serta saling melengkapi.</p>		

### 3. Modul Pengaduan Masyarakat

Modul	PENGADUAN MASYARAKAT		
Blok Fungsi	PELAYANAN		
Sub Blok Fungsi			
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input checked="" type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input type="checkbox"/> Basis Data
		<input checked="" type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input checked="" type="checkbox"/> Generik	<input type="checkbox"/> Spesifik
Object Layanan	<input type="checkbox"/> G-to-G	<input checked="" type="checkbox"/> G-to-B	<input checked="" type="checkbox"/> G-to-C
Fungsi	Menyediakan fasilitas penyampaian dan penyerapan aspirasi, peningkatan partisipasi, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.		
Narasi	Salah satu tugas pemerintah Kabupaten adalah melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten. Sebagai perwujudan demokrasi, dibentuk DPRD sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat.		
Organisasi	Seluruh dinas/lembaga daerah		
Integrasi	Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan		
Info Tambahan	Nama Alias: smskesmas, SI Pengaduan Disdikpora		

### 4. Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan

Modul	PUBLIKASI INFORMASI UMUM DAN KEPERINTAHAN		
Blok Fungsi	PELAYANAN		
Sub Blok Fungsi			
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input type="checkbox"/> Basis Data
		<input type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input checked="" type="checkbox"/> Generik	<input type="checkbox"/> Spesifik
Object Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G-TO-G	<input checked="" type="checkbox"/> G-TO-B	<input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	Publikasi Informasi.		
Narasi	Mempublikasikan semua informasi umum dan pemerintahan ke seluruh masyarakat termasuk diantaranya; berita dan layanan masyarakat.		
Organisasi	Perangkat Kabupaten		
Integrasi	Semua aplikasi <i>e-government</i> yang membutuhkan publikasi informasi ke masyarakat		
Info Tambahan	Nama lain : <a href="http://gunungkidulkab.go.id">gunungkidulkab.go.id</a> dan subdomainnya mislanya <a href="http://dishubkominfo.gunungkidulkab.go.id">dishubkominfo.gunungkidulkab.go.id</a> Rekomendasi: Membangun portal pemerintahan yang mencakup fungsi kolaborasi dan koordinasi inter-lembaga (internal portal) dan fungsi publikasi ke masyarakat (public portal)		

### 5.2.3. Blok Fungsi Administrasi Dan Management (ADM & MGM)

#### 1. Modul Sistem Dokumen Elektronik

Modul	SURAT DOKUMEN ELEKTRONIK		
Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN		
Sub Blok Fungsi			
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input checked="" type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data
		<input type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
Object Layanan	<input type="checkbox"/> G-to-G	<input checked="" type="checkbox"/> G-to-B	<input type="checkbox"/> G-to-C
Fungsi	<p>Menyediakan fungsi pengelolaan dokumen secara elektronik untuk tercapainya tertib administrasi kearsipan dan pelayanan informasi.</p> <p>Menyediakan fungsi kearsipan secara elektronik, termasuk didalamnya penghapusan, pemeliharaan dan pengelolaan status keaktifan.</p> <p>Melakukan klasifikasi dan pengelompokan dokumen (kategorisasi) berdasarkan sifat dan kegunaan, diantaranya Dokumen Kabupaten (yang ditempatkan dalam Lembaran Kabupaten), arsip daerah, dan lain-lain.</p>		
Fungsi	<p>Menyediakan fungsi konversi dokumen terutama dari bentuk hardcopy menjadi bentuk softcopy.</p> <p>Menyediakan fungsi yang memungkinkan pembacaan dokumen dari berbagai sumber dalam berbagai macam format dokumen.</p> <p>Menyediakan fungsi query untuk pencarian data dokumen secara lengkap, akurat, dan cepat, misalnya berdasarkan kategori, judul / perihal, tanggal, versi / revisi, nomor, dan lain-lain.</p>		
Narasi	<p>Sebagai salah satu sumber informasi terekam, arsip mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting untuk mendukung manajemen modern organisasi pemerintah dan bisnis. Oleh karenanya, arsip harus dikelola dalam suatu sistem secara konseptual dan terpadu melalui cara yang profesional. Sistem ini antara lain bertujuan untuk pemeliharaan dan penyelamatan arsip yang memiliki arti penting berkaitan dengan fungsi arsip sebagai sumber sejarah, sumber penelitian, sumber informasi dan bahan untuk menyusun perencanaan, pembuatan kebijakan serta pengambil an keputusan bagi pimpinan.</p>		
Organisasi	Lembaga teknis daerah (badan/kantor arsip)		
	Dinas / lembaga yang membutuhkan pengelolaan dokumen		
Integrasi	Simpeg, SI Kependudukan, SI Kesehatan, SI Perizinan, Surat Elektronik.		
Info Tambahan	<p>Nama alias: Document Management, SIM Arsip</p> <p>Rekomendasi: Membangun sistem pengelolaan dokumen elektronik secara terpadu dengan ruang lingkup mencakup seluruh Pemerintahan Kabupaten, karena satu sistem yang sama bisa dipakai oleh semua unit organisasi yang membutuhkan, baik dipakai secara stand-alone ataupun terpusat.terdapat server khusus yang digunakan untuk menyimpan dokumen elektronik.</p>		

#### 2. Modul Sistem Pendukung Keputusan

Modul	SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN/DSS/Dashboard Eksekutif		
Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT		
Sub Blok Fungsi			
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input type="checkbox"/> Basis Data
		<input checked="" type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
Object Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G-to-G	<input type="checkbox"/> G-to-B	<input type="checkbox"/> G-to-C
Fungsi	<p>Membantu eksekutif daerah menjalankan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing, membantu para eksekutif dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan data dan informasi yang tepat, akurat dan cepat.</p> <p>Menyajikan informasi sesuai tingkat urgensitas misalnya: masalah darurat, masalah penting dan masalah yang kurang penting. Sumber informasi bisa dari kalangan internal pemerintah sendiri, bisnis, umum, maupun pemerintah yang yang lebih tinggi.</p> <p>Menyajikan laporan atas aktivitas dari semua bidang pemerintahan baik berupa pelayanan langsung dan administratif maupun pelayanan fasilitatif yang sedang dijalankan oleh semua unit kerja.</p> <p>Menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Informasi ini lebih bersifat sebagai rangkuman atau laporan dari dinas / lembaga tentang suatu hal khusus, misalnya: pendapatan dan pengeluaran daerah, poyek (dan nilainya) yang sedang berjalan, potensi investasi, dan lain-lain.</p>		
Narasi	<p>Seperti diketahui bahwa secara alami informasi memuat berbagai hal (raw data) yang berasal dari berbagai sumber yang terpisah-pisah dan berada dalam berbagai macam format yang berbeda-beda.</p> <p>Disatu sisi, eksekutif membutuhkan aplikasi yang sifatnya sudah jadi (sudah diolah sesuai kebutuhan), akurat, mudah didapat secara cepat dan siap pakai. Sistem ini dibangun untuk menjawab kebutuhan eksekutif terhadap informasi tersebut.</p>		

Organisasi	Eksekutif Pemerintah Kabupaten
Integrasi	Semua system yang memberikan laporan kinerja kepada eksekutif Pemerintah Kabupaten, data juga dapat berupa data olahan (olahan datacenter) yang diintegrasikan oleh teknologi web service.
Info Tambahan	Nama alias: DSS, Dashboard Eksekutif. Rekomendasi: Membangun sistem DSS dengan mencantumkan (mendefinisikan) semua spesifikasi pelaporan eksekutif yang diharapkan untuk dipenuhi, mencakup semua informasi dari seluruh unit organisasi, sehingga memungkinkan sistem lain untuk melakukan integrasi data sesuai dengan yang diharapkan. Diarahkan menggunakan teknologi integrasi Sistem Informasi yaitu MANTRA (Manajemen Integrasi dan Pertukaran Data) yang telah digunakan oleh lembaga pemerintah.

### 5.2.3. Blok Fungsi Pembangunan

#### 1. Modul Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan

Modul	SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN DATA PEMBANGUNAN		
Blok Fungsi	PEMBANGUNAN		
Sub Blok Fungsi			
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input type="checkbox"/> Basis Data
		<input type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
Object Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G-TO-G	<input type="checkbox"/> G-TO-B	<input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<p>Menyediakan data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan.</p> <p>Data dan informasi yang dimaksud meliputi:</p> <p>Penyelenggaraan pemerintahan daerah  Organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah  Kepala daerah, DPRD, perangkat daerah dan PNS  Keuangan daerah  Potensi sumber daya daerah  Produk hukum daerah  Kependudukan  Informasi dasar kewilayahan</p>		
Narasi	<p>Untuk dapat merencanakan pembangunan dengan optimal diperlukan masukan data dan informasi yang akurat dan up-to-date. Informasi tersebut bisa jadi datang dari aplikasi lain, dan tugas aplikasi ini adalah menyediakan data yang tepat untuk pengguna yang tepat. Arsitektur teknologi Web Service diperlukan untuk mengintegrasikan data.</p>		
Organisasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Integrasi			
Info Tambahan	<p>Nama lain: Knowledge Management, Document Management, Data Warehouse.  Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.</p>		

#### 2. Modul Perencanaan Pembangunan Daerah

Modul	Gunungkidul Plan/PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Blok Fungsi	PEMBANGUNAN		
Sub Blok Fungsi			
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input checked="" type="checkbox"/> Administrasi	<input type="checkbox"/> Basis Data
		<input type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
Object Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G-TO-G	<input type="checkbox"/> G-TO-B	<input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<p>Pembuatan perencanaan pembangunan daerah meliputi semua aspek pembangunan sesuai kewenangan Pemda.</p> <p>Perencanaan yang dimaksud meliputi rencana pembangunan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan rencana kerja pembangunan daerah (1 tahun).</p> <p>Harus ada mekanisme version dan revision control, sehingga setiap perubahan perencanaan dapat diketahui dan dilacak.</p> <p>Termasuk didalamnya template pembuatan renstra oleh tiap satuan kerja pemerintah daerah yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.</p>		
Narasi	<p>Perencanaan pembangunan daerah disusun dalam tiga tahapan: Rencana jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun).</p> <p>Perencanaan tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk dapat merencanakan dengan optimal perlu masukan data dan informasi yang akurat dan up-to-date. Melalui SIM Data Pembangunan, pengguna dapat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan tersebut.</p>		
Organisasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Integrasi	Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan		
Info Tambahan	<p>Nama lain: Gunungkidul Plan/SIMBangDa  Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.</p>		

### 3. Modul Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan

Modul	E-Monev		
Blok Fungsi	PEMBANGUNAN		
Sub Blok Fungsi			
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input checked="" type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data
		<input type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input checked="" type="checkbox"/> Generik	<input type="checkbox"/> Spesifik
Object Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G-TO-G	<input type="checkbox"/> G-TO-B	<input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<p>Pengelolaan dan pemantauan terhadap hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten.</p> <p>Hasil pembangunan yang dimaksud meliputi pembangunan yang dilaksanakan oleh dinas dan lembaga teknis, termasuk Kecamatan dan Kelurahan.</p> <p>Menyediakan template evaluasi untuk memungkinkan dilaksanakannya verifikasi hasil pembangunan terhadap yang telah direncanakan.</p> <p>Menyediakan pelaporan untuk eksekutif (wali Kabupaten dan kepala bappeda) yang menyajikan rangkuman semua hasil pembangunan di Kabupaten Gunungkidul.</p>		
Narasi	<p>Sistem ini diperlukan untuk membantu Pemerintah Kabupaten dan masyarakat yang selama ini susah untuk mendapatkan informasi hasil pembangunan Kabupaten. Padahal informasi ini sangat dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa memang ada aktifitas pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti diamanatkan oleh undang-undang.</p> <p>Informasi tersebut juga dibutuhkan oleh aparat pemerintah Kabupaten sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi proses perencanaan pembangunan selanjutnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih program pembangunan antar dinas / lembaga yang ada.</p>		
Organisasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Integrasi	Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah		
Info Tambahan	Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan Kabupaten.		

## 5.2.4. Blok Fungsi Keuangan

### 1. Modul Sistem Anggaran

Modul	SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)		
Blok Fungsi	KEUANGAN		
Sub Blok Fungsi			
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input checked="" type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data
		<input type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input checked="" type="checkbox"/> Generik	<input type="checkbox"/> Spesifik
Object Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G-TO-G	<input type="checkbox"/> G-TO-B	<input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<p>Menyusun perencanaan anggaran, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menampung usulan anggaran semua unit kerja, membantu proses verifikasi besaran uang dan ketepatan pos rekening dari setiap usulan, serta memfasilitasi proses scrubbing, revisi-revisi dan pembahasan di Tim Anggaran untuk diajukan ke Panitia Anggaran.</p> <p>Mencetak dokumen anggaran: APBD, RASK, DASK, dan lain-lain.</p> <p>Menyediakan fungsi analisa standar belanja, bertujuan untuk melihat kewajaran besaran nilai usulan kegiatan yang diajukan unit kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan rencana kegiatan yang diajukan.</p> <p>Menyediakan fungsi penyusunan harga pokok satuan dan penekanan tugas, dan standar biaya kegiatan/harga pokok kegiatan.</p> <p>Menyimpan harga pokok satuan dan penekanan tugas, dan standar biaya kegiatan/harga pokok kegiatan dalam suatu basis data yang bisa dipakai sebagai rujukan.</p>		
Narasi	Sistem anggaran merupakan alat bantu dalam memasukan dan memproses data anggaran dari RAPBD sampai terbentuknya APBD, serta otorisasi penggunaan anggaran belanja.		
Organisasi	Unit organisasi pengelola Keuangan Daerah		
Integrasi	Blok Fungsi Keuangan, Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Akuntansi Daerah		
Info Tambahan	Rekomendasi: Membangun sistem keuangan secara utuh meliputi modul anggaran, sistem kas dan perbendaharaan serta sistem akuntansi Kabupaten.		

### 2. Modul Sistem Akutansi

Modul	SISTEM AKUTANSI DAERAH (SIPKD)		
Blok Fungsi	KEUANGAN		
Sub Blok Fungsi			
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input checked="" type="checkbox"/> Administrasi	<input type="checkbox"/> Basis Data
		<input type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input checked="" type="checkbox"/> Generik	<input type="checkbox"/> Spesifik
Object Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G-TO-G	<input type="checkbox"/> G-TO-B	<input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<p>Mengelola dan membina administrasi dan pembukuan keuangan Kabupaten.</p> <p>Menyediakan fungsi pengelolaan akuntansi keuangan Kabupaten, mengidentifikasi dan mengelompokkan datadata transaksi untuk keperluan penyusunan buku besar.</p> <p>Menyusun laporan resume kondisi keuangan bagi eksekutif Kabupaten, berdasarkan pada data yang tersedia pada semua modul keuangan lainnnnya seperti pendapatan, belanja langsung dan tak langsung baik publik maupun aparatur, pembiayaan, dana cadangan.</p> <p>Resume bisa dilakukan setiap saat.</p> <p>Hasil resume merupakan merupakan kondisi terbaru saat itu dan memberikan informasi startegis keuangan, misalnya: terjadinya bisa dari perencanaan baik volume maupun waktu atas pendapatan atau belanja.</p>		
Narasi	Sistem ini mengidentifikasi, dan mengelompokkan data-data transaksi yang tertuang dalam buku besar dan buku pembantu (general ledger dan subledger). Beberapa laporan yang dihasilkan misalnya neraca awal, jurnal penyesuaian, dan laporan konsolidasi (laporan keuangan pemda).		
Organisasi	Unit organisasi pengelola Keuangan Daerah		
Integrasi	Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Anggaran Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Akuntansi Daerah		
Info Tambahan	Rekomendasi: Membangun sistem keuangan secara utuh meliputi modul anggaran, sistem kas dan perbendaharaan serta sistem akuntansi Kabupaten.		

## 5.2.5. Blok Fungsi Kepegawaian

### 1. Modul Sistem Informasi Kepegawaian

Modul	Sistem Informasi Kepegawaian		
Blok Fungsi	KEPEGAWAIAN		
Sub Blok Fungsi			
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input checked="" type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data
		<input type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input checked="" type="checkbox"/> Generik	<input type="checkbox"/> Spesifik
Object Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G-TO-G	<input type="checkbox"/> G-TO-B	<input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	Menyediakan fungsi pengelolaan data pegawai, kenaikan pangkat berkala, pensiun.		
Narasi	Sistem ini diharapkan mampu membantu Pemerintah Kabupaten untuk mengelola Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemkab. Hal ini akan mengurangi kesulitan dalam hal pengelolaan data terkait dengan masalah kepegawaian.		
Organisasi	Badan Kepegawaian Daerah		
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan		
Info Tambahan	Nama alias: SIMPEG Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi. Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin interoperabilitinya, terutama dengan aplikasi <i>e-government</i> bertema keuangan.		

### 2. Modul Sistem Penilaian Prestasi Kerja PNS

Modul	SISTEM PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS		
Blok Fungsi	KEPEGAWAIAN		
Sub Blok Fungsi			
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input checked="" type="checkbox"/> Administrasi	<input type="checkbox"/> Basis Data
		<input type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input checked="" type="checkbox"/> Generik	<input type="checkbox"/> Spesifik
Object Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G-TO-G	<input type="checkbox"/> G-TO-B	<input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	Menyediakan fungsi penghitungan beban kerja dan evaluasi kerja. Menyediakan data kinerja PNS. presensi pegawai yang akan mencatat jam masuk, jam pulang, jam kerja efektif, kekurangan jam kerja dan kelebihan jam kerja.		
Narasi	Untuk meningkatkan kinerja pegawai, perlu diberi sanksi bagi mereka yang lalai dan penghargaan bagi mereka yang berprestasi. Oleh karena itu perlu diketahui catatan prestasi kerja (salah satunya dalam ukuran jam kerja efektif) dari masing-masing pegawai sebagai bahan masukan penilaian dan pembinaan.		
Organisasi	Badan Kepegawaian Daerah		
Integrasi	Blok Fungsi Keuangan		
Info Tambahan	Nama lain: e-performa, sistem penilaian kinerja		
Info Tambahan	Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi.		

### 3. Modul Sistem Aplikasi tambahan Penghasilan PNS

Modul	Sistem Aplikasi Tambahan Penghasilan PNS		
Blok Fungsi	KEPEGAWAIAN		
Sub Blok Fungsi			
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input checked="" type="checkbox"/> Administrasi	<input type="checkbox"/> Basis Data
		<input checked="" type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
Object Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G-TO-G	<input type="checkbox"/> G-TO-B	<input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	Menyediakan fungsi Pengukuran beban kerja dan sehingga memberikan output underload, onload ataupun overload..		

Narasi	Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai maka Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud dinyatakan bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai dapat diberikan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi serta pertimbangan objektif lainnya.
Organisasi	Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Integrasi	Blok Fungsi Kepegawaian
Info Tambahan	-
Info Tambahan	Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi. Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin interoperabilitasnya.

## 5.2.6. Blok Fungsi Dinas Dan Lembaga

### 1. Modul Katalog Barang Daerah

Modul	KATALOG BARANG DAERAH		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	KEPEMERINTAHAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data
		<input type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
Object Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G-TO-G	<input type="checkbox"/> G-TO-B	<input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<p>Mendaftar semua item barang yang mungkin dibutuhkan oleh pemkot dalam menjalankan pemerintahan.</p> <p>Memperkirakan nilai barang (dalam Rp) dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyusutan, pembayaran cicilan dan bunga, selisih mata uang, proses pemeliharaan dan sebagainya.</p> <p>Membuat klasifikasi dan pengelompokan kebutuhan barang per satuan unit kerja pemerintah Kabupaten.</p> <p>Menyediakan fungsi query data berdasarkan jenis barang, harga, tahun pembuatan, lokasi, unit kerja.</p> <p>Memberikan bantuan dalam penilaian dan verifikasi kewajaran pada usulan anggaran pengadaan barang.</p>		
Narasi	<p>Sistem katalog barang pada prinsipnya adalah ekstraksi data dari system pengelolaan barang Kabupaten, dengan fungsi dan penggunaan khusus sebagai data rujukan.</p> <p>Contoh pengguna sistem ini adalah:                      Eksekutif Kabupaten, misalnya ingin mengetahui aset yang dimiliki oleh setiap unit kerja, berapa total nilai aset yang dimiliki, aset apa yg dalam waktu dekat akan dimiliki (yang sekarang masih dalam proses pengadaan).</p>		
Narasi	<p>Panitia pengadaan barang, misalnya untuk mengetahui kewajaran harga penawaran barang baru, atau kewajaran usulan anggaran pengadaan barang oleh satuan kerja.</p> <p>Sistem katalog barang daerah disamping membantu eksekutif Kabupaten dalam proses pengambilan keputusan, juga membantu Pemerintah Kabupaten untuk dapat merencanakan proyek pengadaan barang lebih baik lagi, dengan menyediakan basis data informasi barang daerah eksisting dan perkiraan harganya.</p>		
Organisasi	Eksekutif Kabupaten Dinas / Lembaga Teknis Daerah (Bagian Umum Perlengkapan)		
Integrasi	Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Perencanaan Proyek Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Pengelolaan Barang daerah		
Info Tambahan	Nama Alias : Simbada (sistem manajemen barang daerah)		

### 2. Modul Pengelolaan Perusahaan Daerah

Modul	Pengelolaan Perusahaan Daerah (e-monitoring)		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	KEPEMERINTAHAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data
		<input type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
Object Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G-TO-G	<input type="checkbox"/> G-TO-B	<input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	Memasukkan data pengelolaan keuangan pada perusahaan daerah RSUD.		
Narasi	Sistem Pengelolaan Perusahaan Daerah mendapatkan data dari operasional perusahaan berupa data operasional dan keuangan.		
Narasi	Dengan adanya sistem ini pengelolaan perusahaan daerah akan lebih transparan.		
Organisasi	Dinas Kesehatan, PDAM		
Integrasi	Blok Fungsi Kepemerintahan.		
Info Tambahan			

### 3. Modul Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Modul	TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	KEWILAYAHAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data
		<input type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
Object Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G-TO-G	<input type="checkbox"/> G-TO-B	<input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<p>Melakukan pendataan/inventarisasi pertanahan, tataguna tanah dan kepemilikan tanah.                      Pemetaan wilayah pertanahan pemerintah Kabupaten.                      Pembuatan peta tematik peruntukan tanah / lahan sesuai dengan rencana umum tata ruang, misalnya daerah pemukiman, daerah resapan, daerah hutan, persawahan.                      Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pertanahan.                      Menyediakan fungsi yang memudahkan perencanaan tata-ruang dan pengalokasian fungsi lahan berdasarkan data dari peta GIS yang akurat.                      Menyediakan sistem informasi lingkungan hidup, berdasarkan peta tematik tata ruang, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memelihara agar lingkungan hidup dapat dijaga kelestariannya dari hal-hal yang tidak semestinya, misalnya daerah resapan air tidak boleh untuk perumahan.</p>		
Narasi	Sistem tata ruang dan lingkungan hidup memberikan informasi ke pemerintah Kabupaten dan masyarakat umum, peruntukan tata-guna lahan dari suatu wilayah, misalnya sebagai daerah resapan air, daerah pemukiman penduduk, dan lain-lain.		
Narasi	Dengan bantuan sistem informasi geografis, maka informasi dapat disajikan dengan lebih akurat dan lebih nyata, sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan menerbitkan perijinan yang lebih sesuai dengan rencana umum tataruang, dan kerusakan lingkungan dapat diminimalisir sebanyak mungkin.		
Organisasi	Badan LH, Dinas PU		
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan.		
Info Tambahan	Nama lain: SIM Tata Ruang Rekomendasi: membangun sistem tata-ruang dan lingkungan hidup dengan mengikutsertakan sistem pemetaan (GIS) sehingga memudahkan pengguna dalam memanfaatkan sistem ini secara optimal.		

### 4. Modul Potensi Daerah

Modul	POTENSI DAERAH		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	KEWILAYAHAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data
		<input type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
Object Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G-TO-G	<input type="checkbox"/> G-TO-B	<input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<p>Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi Kabupaten, yang menjadi sektor unggulan daerah, meliputi:                      Kehutanan                      Pertanian dan Perkebunan                      Perikanan dan Kelautan                      Pertambangan dan Energi                      Pariwisata                      Menyediakan fungsi pengelolaan basis data potensi daerah.                      Menyediakan fungsi perencanaan dan/atau pemanfaatan potensi daerah dalam program pembangunan Kabupaten.                      Menyajikan/merepresentasikan potensi daerah dalam peta tematik.</p>		
Narasi	Sistem ini membantu Pemerintah Kabupaten mempromosikan semua potensi Kabupaten yang menjadi unggulan daerahnya masing-masing kepada publik dan kalangan bisnis. Diharapkan informasi ini mampu menarik minat kalangan bisnis untuk menanamkan modal dan melakukan kegiatan usaha di bidang tersebut. Selain itu, juga diharapkan dapat menarik minat wisatawan. Informasi disajikan berbasis sistem informasi geografis.		
Narasi	Oleh karena itu, info potensi Kabupaten harus didukung dengan informasi pendukung lain yang lengkap dan memadai seperti: peraturan perundang-undangan yang berhubungan, info syarat dan prosedur investasi, pendaftaran dan perijinan usaha.		
Organisasi	Badan Investasi Daerah Lembaga Teknis lainnya		
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan		

	Blok Fungsi Legislasi, Modul Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangundangan Blok Fungsi, Pelayanan, Modul Bisnis dan Investasi. Blok Fungsi Pelayanan, Modul Pendaftaran dan Perijinan.
Info Tambahan	Nama lain: SIMPOTENDA, SIMPROMODA, GIS-SIMPOTENDA Rekomendasi: membangun sistem informasi potensi daerah dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan organisasi pengelola/penanggung-jawab dari sektor unggulan daerah.

## 5. Modul Pemerintah Desa

Modul	PEMBANGUNAN DESA (Sistem Informasi Desa)		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	KEWILAYAHAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input type="checkbox"/> Basis Data
		<input checked="" type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
Object Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G-TO-G	<input type="checkbox"/> G-TO-B	<input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	Melakukan pendataan/inventarisasi desa, potensi desa, badan usaha milik desa, pelaporan anggaran desa, kegiatan desa. Termasuk didalamnya : Profil desa. Profil pemerintah desa. Pemetaan wilayah desa (raw data). Data demografi desa. Pembuatan peta tematik desa. Pembuatan laporan kegiatan desa.		
Fungsi	Menyediakan fungsi pengelolaan basis data desa. Menyediakan sistem informasi desa, termasuk didalamnya potensi desa, kegiatan desa, potensi investasi dan lain-lain. Menyediakan portal yang dikelola bersama oleh pemerintah desa.		
Narasi	Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi desa, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis.		
Narasi	Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui portal sistem informasi desa.		
Organisasi	Pemerintah desa		
Integrasi	Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah		
Info Tambahan	Rekomendasi: membangun sistem informasi desa yang melibatkan implementasi SIN dan sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi daerah dinas kependudukan dan TKPKD.		

## 6. Modul Pariwisata

Modul	PARIWISATA		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	KEWILAYAHAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data
		<input checked="" type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
Object Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G-TO-G	<input type="checkbox"/> G-TO-B	<input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, terutama di sektor Pariwisata, termasuk didalamnya : Pemetaan wilayah pariwisata (raw data). Pembuatan peta tematik daerah wisata dan sebarannya berdasarkan jenis obyek wisata (wisata pantai/laut, gunung/tebing, hutan/kebun atau wisata lainnya), lokasi obyek wisata, dan lain-lain. Pembuatan peta tematik sarana dan prasarana wisata meliputi hotel, restoran, tempat ibadah, spbu, tempat belanja, bank, dan lain-lain (site map wisata).		
Fungsi	Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pariwisata Menyediakan sistem informasi pariwisata, meliputi : Jenis dan deskripsi obyek wisata, letak daerahnya, transportasi menuju ke obyek tersebut, program wisata, dan lain-lain. Sarana dan prasarana wisata meliputi hotel, restoran, tempat ibadah, spbu, tempat belanja, bank, dan lain-lain. Menyediakan sistem aplikasi kepariwisataan, meliputi : Administrasi pengunjung (tiket masuk, retribusi, statistik pengunjung). Sistem layanan wisata (pemesanan tiket, koordinasi dengan biro perjalanan/biro wisata, koordinasi dengan sistem perhotelan). Pembukuan, administrasi umum, keuangan dan akuntansi (untuk pengelolaan tiap obyek wisata daerah).		
Narasi	Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan		

	informasi kepariwisataan, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya. Sistem ini menyediakan fungsi pengelolaan pariwisata daerah, dimulai dari promosinya, manajemen pelayanan wisata (sistem pemesanan tiket, koordinasi dengan perhotelan, biro wisata), pengelolaan obyek wisata lainnya. Sistem ini akan membantu Pemerintah Kabupaten untuk melakukan inventarisasi data, perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengawasan potensi dan usaha bidang pariwisata daerah. Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi Kabupaten. tersedia integrasi dengan laman media sosial dan platform mobile tertentu
Organisasi	Dinas Daerah Lembaga Teknis Daerah
Integrasi	Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah.
Info Tambahan	Nama alias: SIMPAR, SIM Pariwisata Rekomendasi: membangun sistem informasi kepariwisataan dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi daerah.

## 7. Modul Kesehatan

Modul	KESEHATAN		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data
		<input type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
Object Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G-TO-G	<input type="checkbox"/> G-TO-B	<input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	Publikasi informasi kesehatan kepada masyarakat meliputi: nama dan tempat lokasi rumah sakit dan puskesmas, fasilitas dan layanan poliklinik, laboratorium, apotek. Perencanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meliputi: Menginventarisir kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap wilayah. Menyusun rencana kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, misalnya melalui rumah sakit, balai kesehatan ibu dan anak, posyandu, klinik, praktek dokter, bidan, dokter gigi, ahli khitan, optik, laboratorium kesehatan.		
Narasi	Sistem ini mempunyai dua fungsi: ke masyarakat dan internal Pemda. Melalui sistem ini masyarakat dapat mengetahui informasi sekitar fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi nama dan tempat lokasi rumah sakit dan puskesmas, kelas layanan,		
Narasi	rincian layanan apa saja yang disediakan, dan lain-lain sehingga memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut. Untuk internal Pemda, sistem ini disamping memberikan data nama dan tempat lokasi, juga memberikan status fasilitas kesehatan tersebut, sarana dan prasarana pendukung, status aktivitas kegiatan, statistik penyakit, dan lain-lain sehingga dalam menyusun kebijakan dan program Kerja di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten dapat lebih fokus dan tepat sasaran.		
Organisasi	Dinas Daerah (Dinas Kesehatan) Lembaga / instansi terkait (rumah sakit / puskesmas)		
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan.		
Info Tambahan	Nama alias: SIMKES		

## 9. Modul Pendidikan

Modul	PENDIDIKAN		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data
		<input type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
Object Layanan	<input type="checkbox"/> G-TO-G	<input type="checkbox"/> G-TO-B	<input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<p>Menyediakan informasi pendidikan, dari mulai pendidikan pra-sekolah, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan seterusnya sampai universitas/ perguruan tinggi, meliputi:            Info sekolah dan alamatnya.            Profile sekolah, info kurikulum, tenaga pendidikan, fasilitas belajar-mengajar, status sekolah, akreditasi, daya tampung murid, jumlah murid sekarang.            Program kegiatan dan agenda sekolah, termasuk jadwal penerimaan murid baru, jadwal ujian, kelulusan.            Menyediakan fungsi untuk membantu proses akreditasi sekolah, sesuai dengan sistem akreditasi nasional.            Menyediakan fungsi pelaporan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten meliputi status sekolah, daya tampung murid, jumlah murid sekarang.</p>		
Fungsi	<p>Menyediakan jaringan sistem informasi kependidikan terintegrasi tentang data-data pokok kependidikan, dari mulai pendidikan prasekolah sampai perguruan tinggi.            Data pokok kependidikan yang dimaksud adalah minimum data yang dibutuhkan dari suatu sekolah, seperti: jumlah kelas, jumlah murid, jumlah pengajar, acuan kurikulum.            Data pokok kependidikan bisa saling dipertukarkan antara satu institusi pendidikan dengan lainnya, bahkan dengan pihak Pemkot.</p>		
Narasi	<p>Melalui sistem ini masyarakat dapat mengetahui informasi sekitar pendidikan, dari mulai pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Juga tentang ketersediaan dan sebaran sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada. Melalui sistem informasi kependidikan dapat diketahui dengan</p>		
Narasi	<p>mudah informasi sekolah, daya tampung, lokasi, nilai masuk terendah dan tertinggi, profil sekolah.            Untuk kepentingan Pemkot, sistem ini memberikan status fasilitas pendidikan, daya tampung, jumlah murid, distribusi / sebaran fasilitas pendidikan (dibanding dengan sebaran penduduk usia sekolah), sehingga dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan bidang pendidikan, dapat lebih fokus, tepat sasaran dan berdaya guna.</p>		
Organisasi	<p>Dinas Daerah (Dinas Pendidikan)            Lembaga / instansi terkait (institusi sekolah)</p>		
Integrasi	<p>Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan.</p>		
Info Tambahan	<p>Nama alias: SIMDIKDA</p>		

## 10. Modul Ketenagakerjaan

Modul	KETENAGAKERJAAN		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data
		<input type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
Object Layanan	<input type="checkbox"/> G-TO-G	<input type="checkbox"/> G-TO-B	<input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<p>Memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat luas, meliputi: instansi/ lembaga/ perusahaan yang membutuhkan, syarat pendaftaran, kualifikasi yang dibutuhkan.            Memfasilitasi masyarakat yang ingin mencari pekerjaan (pengurusan kartu kuning).            Menyediakan fungsi pengumuman pekerjaan dan administrasi berkaitan dengan pengurusan pekerjaan on-line, menyediakan fungsi call-center untuk pelayanan tersebut (atau melalui e-mail, atau sistem elektronik lain)            Memberikan informasi tentang balai latihan kerja (dan fasilitas pelatihan lain) yang disediakan pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, meliputi standar kompetensi yang dibentuk, syarat dan waktu pendaftaran, tempat pelatihan, tempat magang.            Memberikan informasi umum tentang ketenaga-kerjaan, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem upah dan standarisasi besaran upah menurut peraturan yang berlaku.</li> <li>• Sistem keselamatan kerja, beserta uraiannya untuk setiap jenis pekerjaan yang umum seperti konstruksi, pertambangan, eksplorasi.</li> <li>• Sistem jaminan sosial dan suransi tenaga kerja, sistem pensiun dan penjaminan hari tua, program apa saja yang bisa diikuti,</li> </ul>		

	instansi/lembaga penyelenggaranya siapa saja.
Narasi	Sistem ini membantu Pemerintah Daerah khususnya dalam memberikan pelayanan informasi ketenagakerjaan. Melalui publikasi informasi (yang terintegrasi dengan lembaga/instansi pemda, dunia industri dan perusahaan penyedia lapangan kerja) pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan informasi pekerjaan seperti: lowongan pekerjaan, syarat pendaftaran, spesifikasi keahlian. Melalui aplikasi ini, pemerintah juga bisa menyebarluaskan informasi tentang balai latihan kerja dan program pelatihannya yang dapat diikuti oleh masyarakat, standar kompetensi apa saja yang bisa disediakan, dimana tempat magangnya.
Organisasi	Dinas Daerah (Dinas Tenaga Kerja) Lembaga / instansi terkait
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan. Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Industri dan Perdagangan.
Info Tambahan	Nama alias: SIMNAKER

## 11. Modul Industri dan Perdagangan

Modul	INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN
Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
	<input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran
	<input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data
	<input type="checkbox"/> Lainnya
	Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
Object Layanan	<input type="checkbox"/> G-TO-G <input type="checkbox"/> G-TO-B <input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	Membentuk jaringan sistem informasi perindustrian (termasuk IKM, perusahaan daerah dan koperasi) dan menyediakan informasi umum tentang hal tersebut kepada masyarakat seperti: nama badan usaha, lokasi, bidang usaha, produk unggulan, profile perusahaan. Membentuk jaringan sistem informasi perdagangan, meliputi kegiatan ekspor-import, perdagangan barang dan jasa, pasar modal, dan jenis kegiatan transaksi perdagangan lainnya. Memberikan informasi tentang hal tersebut kepada masyarakat seperti: info kurs/valuta, indeks saham, harga sembako, komoditi unggulan. Menyediakan fungsi komunikasi data lowongan kerja dengan sistem ketenagakerjaan dari dinas/instansi terkait dengan format data yang distandarisasi, mencakup: perusahaan yang membutuhkan, syarat dan waktu pendaftaran, kualifikasi yang dibutuhkan, jadwal test, pengumuman. Menyediakan fungsi konsultasi bagi para masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan pengetahuan / konsultasi bisnis / pembinaan usaha IKM melalui media elektronik seperti: rubrik / kolom berita, tanya jawab lewat e-mail, mailing list, forum rembug dan diskusi lewat internet.
Narasi	Sistem industri dan perdagangan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten terutama untuk memfasilitasi masyarakat akan kebutuhan layanan informasi industri dan perdagangan, misalnya info lowongan kerja, info harga bahan pokok, info pasar saham, dan lain-lain. Disamping itu juga sebagai cara Pemerintah Kabupaten dalam upayanya untuk memberdayakan masyarakat, terutama peningkatan pengetahuan dan ketrampilan di bidang industri, perdagangan, koperasi dan IKM. Salah satu mediana adalah dengan memberikan fasilitas konsultasi online melalui internet, surat elektronik, forum.
Organisasi	Dinas Daerah (Dinas Industri dan Perdagangan) Lembaga / instansi terkait Lembaga / instansi terkait
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan. Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Ketenagakerjaan.
Info Tambahan	Nama alias: SIMINDAG

### 5.3. Sumber Daya Manusia

Saat ini dengan struktur pengelola TIK yang ada telah cukup, namun kondisi ini jauh dari kondisi tatakelola TIK yang ideal. Sehingga perlu ditingkatkan lagi jumlah dan kompetensinya. Sumberdaya TIK yang perlu ditingkatkan adalah pada posisi berikut :

1. Programmer
2. Database Administrator
3. Network administrator.

Secara lebih mendetail posisi diatas diwajibkan memiliki kompetensi sebagai berikut :

1. Programmer
  - a. Memiliki pemahaman dan pengalaman dalam pengembangan sistem informasi berbasis Web dan Desktop.
  - b. Mampu bekerja sebagai tim.
  - c. Menguasai bahasa pemrograman PHP, Delphi, VB.Net.
  - d. Memiliki kemampuan mendesain Web dengan menguasai CSS, Javascript dan framework frontend lainnya.
  - e. Memiliki pemahaman yang baik dalam menggunakan perangkat pengembangan software.
2. Database administrator
  - a. Memiliki pemahaman yang baik mengenai proses perancangan, implementasi dan pengelolaan/maintenance database.
  - b. Mampu mengadministrasi basisdata dengan menggunakan MySQL, Oracle dan PosgreSQL.
  - c. Menguasai pengelolaan pengguna.
  - d. Memahami prinsip keamanan basisdata dan mampu mengimplementasikannya.
  - e. Mampu melakukan optimalisasi basisdata.
3. Network administrator
  - a. Memiliki kemampuan pengelolaan LAN dan WAN.
  - b. Menguasai Mikrotik, Cisco, Windows dan Linux networking.
  - c. Memahami proses instalasi infrastruktur jaringan, baik wireless maupun cable. Diutamakan memiliki pengetahuan pengelolaan Fiber Optik.

Pengetahuan terhadap tatakelola TIK yang baik sudah dimiliki oleh pimpinan (CIO) namun masih perlu ditingkatkan lagi. E-Leadership di instansi lain masih rendah. Kemampuan E-leadership (kepemimpinan dengan orientasi TIK) dalam sebuah institusi memiliki pengaruh eksponensial dalam keberhasilan penerapan tata kelola TIK.

Dikarenakan perkembangan teknologi informasi yang cepat, diperlukan peningkatan pengetahuan dan kompetensi. Peningkatan pengetahuan dan kompetensi bisa dilakukan dengan program pelatihan. Pelatihan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :

1. Programmer
  - a. Pelatihan dan sertifikasi pemrograman web.
  - b. Pelatihan dan sertifikasi desain web.
  - c. Pelatihan dan sertifikasi pemrogram aplikasi desktop (Delphi, VB)
  - d. Pelatihan keamanan aplikasi.
2. Database administrator
  - a. Pelatihan dan sertifikasi database administrator
  - b. Pelatihan dan sertifikasi database engineer
  - c. Pelatihan dan sertifikasi optimalisasi database
  - e. Pelatihan dan sertifikasi keamanan database.
3. Network Administrator
  - a. Pelatihan dan sertifikasi pengelolaan LAN dan WAN
  - b. Pelatihan dan sertifikasi pengelolaan Datacenter.
  - c. Pelatihan dan sertifikasi pengamanan NOC dan datacenter.
4. CIO
  - a. Pelatihan Tatakelola TIK
  - b. Pelatihan Manajemen Proyek.
  - d. Pelatihan Perencanaan strategis TIK
  - e. Pelatihan Pengelolaan jaringan NOC
  - f. Pelatihan Pengelolaan Datacenter.
  - g. Pelatihan Pengelolaan Dokumen Elektronik
  - h. Seminar dan workshop terkait E-government
  - i. Seminar Big data, IoT dan mobile development.
  - j. Pelatihan Audit TIK.

Empat sumber daya manusia tersebut diatas merupakan hal mendasar untuk dipenuhi agar tatakelola TIK menjadi baik. Sedang posisi lain seperti teknisi komputer, operasional dan maintenance NOC, Jaringan LAN dan mobile developer memanfaatkan tenaga outsource.

## BAB VI ROADMAP IMPLEMENTASI TIK

### 6.1. Konsep Roadmap

Pengembangan roadmap adalah sebuah arahan (direction) bagi usaha pengembangan yang bersifat strategis, berskala besar, dan berdurasi panjang. Esensi sebuah roadmap adalah adanya jalur-jalur (paths) pengembangan yang bila diikuti akan membawapelakunya mencapai tujuan pengembangan tersebut. Jalur-jalur ini disusun sedemikianrupa dengan memperhatikan berbagai faktor yang melekat pada konteks, situasi, dan lingkungan pengembangan, sehingga dapat mengantarkan pada pencapaian tujuan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Dokumen roadmap ini menjelaskan tentang bagaimana komponen-komponen dalam rencana induk akan dikembangkan dalam kurun waktu dan tahap-tahap tertentu

Roadmap ini disusun dengan menggunakan asas keluwesan, artinya sengaja dibuat tidak terlalu rigid untuk memberikan ruang dalam melakukan penyesuaian dan modifikasi dalam perjalanannya. Karena dinamika perkembangan TIK yang begitu cepat perubahan-perubahan lingkungan dapat terjadi kapan saja, maka dokumen Roadmap ini terbuka untuk ditinjau dan dievaluasi kapan saja. Jika dari hasil evaluasi ditemukan kebutuhan untuk mengubah apa yang telah dirancang, perubahan tersebut perlu direfleksikan ke dalam dokumen ini dan dieksekusi secara semestinya.

### 6.3. Tahapan dalam roadmap

Tahapan-tahapan dalam roadmap yang disajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

No	Komponen	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan Bandwidth</li> <li>- Pembangunan Datacenter beserta metadata yang dapat diakses oleh semua pihak yang akan mengembangkan sistem.</li> <li>- Maintenance infrastruktur jaringan intranet/internet</li> <li>- Pengadaan Perangkat keras Smartvillage</li> <li>- Pembangunan Jaringan Fiber Optik</li> <li>- Maintenance Jaringan Fiber Optik</li> <li>- Integrasi Jaringan dengan NOC</li> <li>- Peningkatan Layanan NOC</li> <li>- Penguatan Keamanan Jaringan</li> <li>- Penyiapan infrastruktur e-ticketing</li> <li>- Penambahan akses infrastruktur akses publik dengan prioritas daerah wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan Bandwidth</li> <li>- Pembangunan Datacenter beserta metadata yang dapat diakses oleh semua pihak yang akan mengembangkan sistem.</li> <li>- Maintenance Datacenter</li> <li>- Maintenance infrastruktur jaringan intranet/internet</li> <li>- Pengadaan perangkat Keras Smartvillage</li> <li>- Pembangunan jaringan Fiber Optik</li> <li>- Maintenance Jaringan Fiber Optik</li> <li>- Integrasi Jaringan dengan NOC</li> <li>- Peningkatan Layanan NOC</li> <li>- Penguatan Keamanan Jaringan</li> <li>- Penambahan akses infrastruktur akses publik dengan prioritas tempat umum</li> <li>- Pembuatan layanan protokol keamanan (HTTPS server)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan Bandwidth</li> <li>- Pengembangan Datacenter beserta metadata yang dapat diakses oleh semua pihak yang akan mengembangkan sistem.</li> <li>- Maintenance Datacenter</li> <li>- Maintenance infrastruktur jaringan intranet/internet</li> <li>- Pengadaan perangkat Keras Smartvillage</li> <li>- Pembangunan jaringan Fiber Optik</li> <li>- Maintenance Jaringan Fiber Optik</li> <li>- Integrasi Jaringan dengan NOC</li> <li>- Peningkatan Layanan NOC</li> <li>- Penguatan Keamanan Jaringan</li> <li>- Penambahan Perangkat keras jaringan</li> <li>- Peningkatan layanan protokol keamanan (HTTPS server)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan Bandwidth</li> <li>- Optimalisasi Datacenter</li> <li>- Maintenance Datacenter</li> <li>- Maintenance infrastruktur jaringan intranet/internet</li> <li>- Pengadaan perangkat Keras Smartvillage</li> <li>- Pembangunan jaringan Fiber Optik</li> <li>- Maintenance Jaringan Fiber Optik</li> <li>- Integrasi Jaringan dengan NOC</li> <li>- Peningkatan Layanan NOC</li> <li>- Penguatan Keamanan Jaringan</li> <li>- Penambahan Perangkat keras jaringan</li> <li>- Peningkatan layanan protokol keamanan (HTTPS server)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan Bandwidth</li> <li>- Optimalisasi Datacenter</li> <li>- Maintenance Datacenter</li> <li>- Maintenance infrastruktur jaringan intranet/internet</li> <li>- Pengadaan perangkat Keras Smartvillage</li> <li>- Pembangunan jaringan Fiber Optik</li> <li>- Maintenance Jaringan Fiber Optik</li> <li>- Integrasi Jaringan dengan NOC</li> <li>- Peningkatan Layanan NOC</li> <li>- Penguatan Keamanan Jaringan</li> <li>- Penambahan Perangkat keras jaringan</li> <li>- Peningkatan layanan protokol keamanan (HTTPS server)</li> </ul>

No	Komponen	Tahun
----	----------	-------

		2018	2018	2018	2018	2018
2	Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meneruskan &amp; Mengembangkan SI yang sudah ada</li> <li>- Pembuatan Webservice sebagai landasan Sistem Pendukung Keputusan/SmartVillage</li> <li>- Pengadaan SI Aset</li> <li>- SI kepariwisataan e-retribusi</li> <li>- SI portal kepariwisataan</li> <li>- SI Kearsipan</li> <li>- SI Kepariwisataan mobile</li> <li>- Pengembangan Sistem Informasi Desa</li> <li>- Pengadaan Sistem Pendukung Keputusan.</li> <li>- Pengembangan dan peningkatan Pemanfaatan situs Portal Pemerintah Kabupaten.</li> <li>- Penerapan Sistem Informasi Bagi-pakai</li> <li>- Pengembangan data elektronik dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Alih media dokumen berbasis kertas.</li> <li>o Mengelola metadata dokumen/kearsipan</li> <li>o Konversi form konvensional ke form digital.</li> <li>o Membuat sistem layanan web services dengan menerapkan pendekatan Government Service bus lokal.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meneruskan &amp; mengembangkan SI yang sudah ada Pengadaan Sistem Pendukung Keputusan/Smartvillage</li> <li>- SI kepariwisataan e-retribusi</li> <li>- SI Kearsipan</li> <li>- Pengembangan dan peningkatan Pemanfaatan situs Portal Pemerintah Kabupaten.</li> <li>- Rekonfigurasi struktur website portal dengan pendekatan <i>search engine friendly</i> dan <i>mobile friendly</i>.</li> <li>- Integrasi portal pemerintah dengan media sosial</li> <li>- Pengembangan Sistem Informasi Desa</li> <li>- E-retribusi Lainnya : Pasar</li> <li>- Penerapan Sistem Informasi Bagi-pakai</li> <li>- Pengembangan data elektronik dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Alih media dokumen berbasis kertas.</li> <li>o Mengelola metadata dokumen/kearsipan</li> <li>o Konversi form konvensional ke form digital.</li> <li>o Membuat sistem layanan web services dengan menerapkan pendekatan Government Service bus lokal.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meneruskan dan mengembangkan SI yang sudah ada</li> <li>- Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan/Smartvillage</li> <li>- Pengembangan Aplikasi Android Pariwisata</li> <li>- Pengembangan Sistem Informasi Desa</li> <li>- Pengembangan dan peningkatan Pemanfaatan situs Portal Pemerintah Kabupaten.</li> <li>- Pembuatan basis data terpadu Pengembangan <i>webservices</i> aplikasi e-Government.</li> <li>- Pembangunan aplikasi data warehouse.</li> <li>- Penambahan fitur keamanan pada Portal pemerintah</li> <li>- E-retribusi Lainnya : Angkutan jalan</li> <li>- Penerapan Sistem Informasi Bagi-pakai</li> <li>- Pengembangan data elektronik dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Alih media dokumen berbasis kertas.</li> <li>o Mengelola metadata dokumen/kearsipan</li> <li>o Konversi form konvensional ke form digital.</li> <li>o Membuat sistem layanan web services dengan menerapkan pendekatan Government Service bus lokal.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meneruskan dan mengembangkan SI yang sudah ada</li> <li>- Pengembangan SI yang sudah ada</li> <li>- Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan/Smartvillage</li> <li>- Pengembangan Sistem Informasi Desa</li> <li>- Pengembangan dan peningkatan Pemanfaatan situs Portal Pemerintah Kabupaten.</li> <li>- Pengujian dan pemantapan keamanan dan kehandalan sistem.</li> <li>- Pembangunan aplikasi dashboard eksekutif (multiplatform)</li> <li>- Pembuatan aplikasi pengelolaan dokumen elektronik yang memiliki fitur digital signature</li> <li>- E-retribusi Lain-lain.</li> <li>- Penerapan Sistem Informasi Bagi-pakai</li> <li>- Pengembangan data elektronik dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Alih media dokumen berbasis kertas.</li> <li>o Mengelola metadata dokumen/kearsipan</li> <li>o Konversi form konvensional ke form digital.</li> <li>o Membuat sistem layanan web services dengan menerapkan pendekatan Government Service bus lokal.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meneruskan dan mengembangkan SI yang sudah ada</li> <li>- Pengembangan SI yang sudah ada</li> <li>- Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan/Smartvillage</li> <li>- Pengembangan Sistem Informasi Desa</li> <li>- Pengembangan dan peningkatan Pemanfaatan situs Portal Pemerintah Kabupaten.</li> <li>- Pengembangan aplikasi dashboard eksekutif</li> <li>- Penerapan Sistem Informasi Bagi-pakai</li> <li>- Pengembangan data elektronik dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Alih media dokumen berbasis kertas.</li> <li>o Mengelola metadata dokumen/kearsipan</li> <li>o Konversi form konvensional ke form digital.</li> <li>o Membuat sistem layanan web services dengan menerapkan pendekatan Government Service bus lokal.</li> </ul> </li> </ul>

No	Komponen	Tahun
----	----------	-------

		2018	2018	2018	2018	2018
3	Organisasi & Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan Dinas Kominfo</li> <li>- Sosialisasi rencana induk pengembangan e-Government.</li> <li>- Peningkatan Kompetensi TIK <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pelatihan Programmer Web</li> <li>o Pelatihan Pengelolaan Situs Portal Gunungkidul</li> <li>o Pelatihan Programmer Desktop</li> <li>o Pelatihan Programmer Mobile</li> <li>o Pelatihan Programmer Database</li> <li>o Pelatihan Administrasi Jaringan FO</li> <li>o Pelatihan Pengelolaan Datacenter</li> <li>o Pelatihan Pengelolaan NOC</li> <li>o Pelatihan Web Service</li> </ul> </li> <li>- Pembentukan Komite TIK Dengan diketuai oleh seorang pimpinan kantor (konsepsio) dinas TIK.</li> <li>- Pengesahan perubub tatakelola nama domain</li> <li>- Penguatan Iklim E-Gov <ul style="list-style-type: none"> <li>o Seminar E-Government di lingkungan Kab GK.</li> <li>o Pembuatan kewajiban digitalisasi Arsip kantor.</li> <li>o Membuka forum pemerintah dan relawan TIK.</li> <li>o Studi banding dg daerah/instansi lain</li> </ul> </li> <li>- Pembuatan aturan rekomendasi penyebaran infrastruktur telekomunikasi di daerah pariwisata.</li> <li>- Kajian Pemetaan &amp; Teknis pemanfaatan Fiber Optik</li> <li>- Survei Penggunaan Jaringan OPD guna mengidentifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kompetensi TIK <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pelatihan Pengelolaan Situs Portal Gunungkidul</li> <li>o Pelatihan pengelolaan dokumen elektronik</li> <li>o Pelatihan Pengelolaan Jaringan NOC.</li> <li>o Transfer Knowledge pengelolaan NOC (pelatihan internal)</li> <li>o Pelatihan Programmer Database</li> <li>o Pelatihan keamanan datacenter</li> <li>o Pelatihan keamanan NOC</li> <li>o Pelatihan Web Service</li> <li>o Pelatihan Pemanfaatan media sosial</li> </ul> </li> <li>- Penguatan Komite TIK Aturan tupoksi komite TIK Pengembalian kewenangan PPID ke dinas Kominfo.</li> <li>- Penguatan iklim E-Gov <ul style="list-style-type: none"> <li>o Seminar E-Government di lingkungan Kab Gunungkidul.</li> <li>o Monitoring digitalisasi Arsip kantor.</li> <li>o Fasilitasi forum pemerintah dan relawan TIK.</li> <li>o Studi banding dg daerah/instansi lain</li> </ul> </li> <li>- Implementasi Gunungkidul <i>Smartvillage</i></li> <li>- Penambahan SDM <ul style="list-style-type: none"> <li>o Programmer Mobile/Android</li> </ul> </li> <li>- Penerapan Kajian Penerapan &amp; Teknis Jaringan FO</li> <li>- Pembuatan SOP Rekomendasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kompetensi TIK <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pelatihan Pengelolaan Situs Portal Gunungkidul</li> <li>o Pelatihan pengelolaan dokumen elektronik</li> <li>o Pelatihan Pengelolaan Jaringan NOC.</li> <li>o Transfer Knowledge pengelolaan NOC.</li> <li>o Pelatihan Programmer Database</li> <li>o Pelatihan <i>Mobile programming</i></li> <li>o Pelatihan pemanfaatan media sosial</li> </ul> </li> <li>- Koordinasi Komite TIK</li> <li>- Penguatan iklim E-Gov <ul style="list-style-type: none"> <li>o Seminar E-Government di lingkungan Kab GK.</li> <li>o Monitoring digitalisasi Arsip kantor.</li> <li>o Fasilitasi forum pemerintah dan relawan TIK.</li> <li>o Studi banding dg daerah/instansi lain</li> </ul> </li> <li>- Pengembangan Gunungkidul <i>Smartvillage</i></li> <li>- Penambahan SDM <ul style="list-style-type: none"> <li>o Digital Media Manager</li> </ul> </li> <li>- Pembuatan SOP rekomendasi</li> <li>- Penerapan Kajian Penerapan &amp; Teknis Jaringan FO</li> <li>- Pembuatan SOP Rekomendasi <ul style="list-style-type: none"> <li>o SOP Keamanan data dan informasi.</li> <li>o SOP Pengembangan Aplikasi</li> </ul> </li> <li>o SOP Standardisasi Perangkat Lunak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kompetensi TIK <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pelatihan Pengelolaan keamanan Jaringan NOC.</li> <li>o Pelatihan Programmer Database</li> <li>o Pelatihan sistem informasi eksekutif</li> <li>o Pelatihan Optimasi Databaseserver.</li> <li>o Pelatihan Bigdata</li> <li>o Pelatihan Migrasi sistem</li> </ul> </li> <li>- Koordinasi Komite TIK</li> <li>- Penguatan iklim E-Gov <ul style="list-style-type: none"> <li>o Seminar E-Government di lingkungan Kab GK.</li> <li>o Monitoring digitalisasi Arsip kantor.</li> <li>o Fasilitasi forum pemerintah dan relawan TIK.</li> <li>o Studi banding dg daerah/instansi lain</li> </ul> </li> <li>- Pengembangan Gunungkidul <i>Smartvillage</i></li> <li>- Pembuatan SOP Rekomendasi <ul style="list-style-type: none"> <li>o SOP Pemanfaatan SmartVillage</li> <li>o SOP Permintaan Informasi dan Dokumentasi</li> </ul> </li> <li>- Evaluasi pemanfaatan TIK berdasarkan hasil audit TIK</li> <li>- Persiapan penyusunan master plan jangka panjang 15 atau 20 tahun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kompetensi TIK <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pelatihan Pengelolaan Jaringan NOC.</li> <li>o Pelatihan Programmer Database</li> <li>o Pelatihan Bigdata</li> <li>o Pelatihan Keamanan SI</li> <li>o Pelatihan Keamanan Jaringan Komputer</li> <li>o Pelatihan <i>backup</i> Sistem.</li> </ul> </li> <li>- Koordinasi Komite TIK</li> <li>- Penguatan iklim E-Gov <ul style="list-style-type: none"> <li>o Seminar E-Government di lingkungan Kab GK.</li> <li>o Monitoring digitalisasi Arsip kantor.</li> <li>o Fasilitasi forum pemerintah dan relawan TIK.</li> <li>o Studi banding dg daerah/instansi lain</li> </ul> </li> <li>- Pengembangan Gunungkidul <i>Smartvillage</i></li> <li>- Penyusunan RIP 2022 – 2026.</li> </ul>

	<p>penggunaan jaringan di lingkungan pemkab Gunungkidul</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi kelayakan infrastruktur NOC dan Datacenter berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kelayakan ruang server</li> <li>o Kelayakan kelistrikan dan grounding</li> </ul> </li> <li>- Kajian gunungkidul Smartvillage (Kajian interoperabilitas SI)</li> <li>- Penambahan SDM <ul style="list-style-type: none"> <li>o Restrukturisasi SDM Dinas</li> <li>o Perekrutan tenaga SDM Baru (Jaringan)</li> </ul> </li> <li>- Pembuatan SOP Rekomendasi <ul style="list-style-type: none"> <li>o SOP Layanan dasar NOC</li> <li>o SOP Pelaporan pengelolaan TIK</li> <li>o SOP Maintenance</li> <li>o SOP Pelatihan dan Sosialisasi</li> </ul> </li> <li>- Pendataan Aset TIK di Pemerintah Kab. Gunungkidul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o SOP spesifikasi perangkat jaringan OPD</li> <li>o SOP standar pemakaian jaringan OPD</li> <li>o SOP Pengelolaan Jaringan NOC</li> <li>o SOP interoperabilitas SI</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi hasil evaluasi kelayakan infrastruktur NOC dan Datacenter.</li> <li>- Pembuatan peraturan pendukung implementasi e-ticketing</li> <li>- Aturan kewajiban koordinasi dengan Dinas Kominfo saat maintenance gedung.</li> <li>- Pembuatan peraturan standar pengadaan perangkat lunak sehingga interoperabilitas perangkat lunak tetap terjaga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi hasil evaluasi kelayakan infrastruktur NOC dan Datacenter.</li> <li>- Audit TIK</li> <li>- Penambahan terminal akses bagi masyarakat.</li> <li>- Penambahan sarana pendukung jaringan</li> <li>- Pembuatan aturan tentang <i>digitalsignature</i></li> </ul>		
--	---	--	--	--	--

## BAB VII PENUTUP

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang baik pada gilirannya akan mendukung proses penentuan arah dan kebijakan organisasi. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi bagi Pemerintah Daerah diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan organisasi dalam menjalankan berbagai fungsi organisasi. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika berfungsi sebagai fasilitator, mediator serta koordinator dari fungsi-fungsi pemerintahan yang sangat erat kaitannya dengan aspek-aspek informasi yang sifatnya lintas wilayah dan lintas sektoral.

Dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyebutkan terdapat beberapa isu-isu strategis yang terkait dengan teknologi informasi antara lain adalah (1) keterbatasan sumberdaya dalam penerapan teknologi informasi dan computer (TIK) dalam rangka implementasi sistem pelayanan pemerintah berbasis digital (*Digital Government Services*), (2) belum adanya sistem tunggal layanan *Digital Government Services(DGS)* yang unggul dan terintegrasi, (3) belum optimalnya pemberitaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada media masa dan media *online* dan (4) masih terdapatnya wilayah *blank spot* yang belum terlayani akses informasi.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul diletakkan pada sektor Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata dan pengembangan Desa dalam agenda peningkatan Daya Beli sebagai sektor unggulan (Core Competency) dan mendorong sektor pelayanan dasar, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi lokal dengan membenahan kelembagaan secara menyeluruh melalui sistem ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut dan mengacu pada tingkatan pengembangan *e-government* menurut Hermawan Kertajaya dkk. (2002), sebaiknya menuruti tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pertama, *e-government* dikembangkan sebagai internally-networked public service provider (kuadran I).
2. Tahap kedua, *e-government* dikembangkan menjadi externally-networked public service provider (kuadran II).
3. Tahap ketiga meloncat ke externally-networked economic development oriented (kuadran III).

Tahap pertama telah diawali dengan pembangunan infrastruktur TIK yang sekarang berjalan. Tindak lanjutnya adalah dengan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan antar instansi dan pembangunan berbagai sistem informasi di beberapa instansi yang sudah ada. Pengembangan ini berfokus pada pemanfaatan infrastruktur jaringan tersebut untuk operasional dan koordinasi antar instansi,

peningkatan kualitas layanan dan sistem kerja secara internal. Konsep inisiasi *smart village* juga termasuk dalam kuadran ini.

Tahap kedua telah dimulai dengan serta telah tersedianya tempat mengurus perijinan dalam satu loket. Kondisi ini tinggal dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikan seluruh instansi perijinan secara online. Sesuai dengan visi pengembangan *e-government*, pendekatan “layanan satu loket” perlu tetap dipegang dalam layanan tahap kedua ini, selain faktor efektif, efisien, transparan juga masyarakat pengguna jasa tidak perlu tahu lokasi asal atau instansi pemberi layanan, pengguna tinggal datang ke tempat pelayanan satu loket dan mendapat layanan sesuai jenis layanan yang diperlukan. Bentuk *Smart-Village* dalam tahap ini berbentuk *command center* sederhana dimana pihak eksekutif bisa mengakses semua informasi yang dimiliki oleh pemkab.

Tahap ketiga baru bisa dilakukan jika Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memfasilitasi terbentuknya komunitas lokal yang berbasis TIK, seperti membangun *Info Center/Call Center* (Telecenter) yang merupakan komunitas ditingkat bawah untuk dapat memanfaatkan TIK untuk peningkatan wawasan dan perekonomian mereka. Ketiga pentahapan tersebut akan dijabarkan dalam tahapan pengembangan *e-government* untuk kurun waktu 5 tahun.

Pada akhirnya keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana induk ini sangat tergantung pada komitmen pimpinan. Komitmen diwujudkan dalam berbagai bentuk, di antaranya berupa kebijakan, jaminan kepastian, sampai pada dukungan moral. Keberhasilan penerapan teknologi tidak ditentukan oleh teknologi itu sendiri, melainkan pada orang-orang yang mampu menggerakkan dan mengawal perubahan yang disebabkan karena teknologi tersebut.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH